BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 269 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik dan Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Diskominfo yang selanjutnya disebut Renstra Diskominfo adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Diskominfo yang selanjutnya disebut Renja Diskominfo adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA DISKOMINFO

Pasal 2

Dokumen Renstra Diskominfo merupakan dokumen perencanaan strategis Diskominfo untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Diskominfo yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Diskominfo bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Diskominfo dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Diskominfo agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Diskominfo;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Diskominfo;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Diskominfo.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DISKOMINFO

Pasal 4

(1) Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Diskominfo dalam menyusun Renja Diskominfo.

(2) Renstra Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Diskominfo paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Diskominfo; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Diskominfo.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029;
   2. strategi Diskominfo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Diskominfo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Diskominfo; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISKOMINFO

Pasal 5

(1) Diskominfo melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Diskominfo dan evaluasi hasil Renstra Diskominfo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Diskominfo terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Diskominfo.

(3) Kepala Diskominfo menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Diskominfo.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DISKOMINFO

Pasal 6

Perubahan Renstra Diskominfo dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Diskominfo mempedomani perubahan RPJMD;

b. perubahan Renstra Diskominfo dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Diskominfo, maka Renstra Diskominfo dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Diskominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Diskominfo terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Diskominfo.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 269

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025–2029 juga diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta misi pembangunan nasional (Asta Cita). Instruksi ini juga mengamanatkan agar RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik, sementara Renstra PD harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD disahkan. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum

mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah terindentifikasi.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Bandung. Selain itu dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, dan berhasilguna, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah.

Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya.

Sebagai salah satu fungsi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan. Peran tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk berupaya meningkatkan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan bahan kebijakan dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian Kabupaten Bandung dalam periode Tahun 2025 – 2029 sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Landasan

hukum yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital;
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung;
38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257);
39. Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung adalah memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang komunlikasi dan informatika, statistik dan persandian Kabupaten Bandung sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan harmonis serta berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah agar terciptanya keterpaduan perencanaan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian yang akuntabel dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Diskominfo Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;

BAB III : Tujuan dan Sasaran, memuat tentang pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan, yang memuat tentang program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan;

BAB V : Penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMINFO

2.1 Gambaran Pelayanan Diskominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo), merupakan salah satu lembaga teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Diskominfo berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah. Diskominfo merupakan leading sektor pada 3 urusan, yakni urusan komunikasi informatika, urusan statistik dan urusan persandian, dalam Renstra tahun 2025-2029 akan berfokus pada peningkatan pelayanan publik hal ini bertujuan demi Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital. Diskominfo Kabupaten Bandung juga fokus dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal Dinas sendiri dan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Diskominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo), merupakan salah satu lembaga teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2025 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Diskominfo Kabupaten Bandung juga fokus dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal Dinas sendiri dan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dengan tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, melaksanakan program:

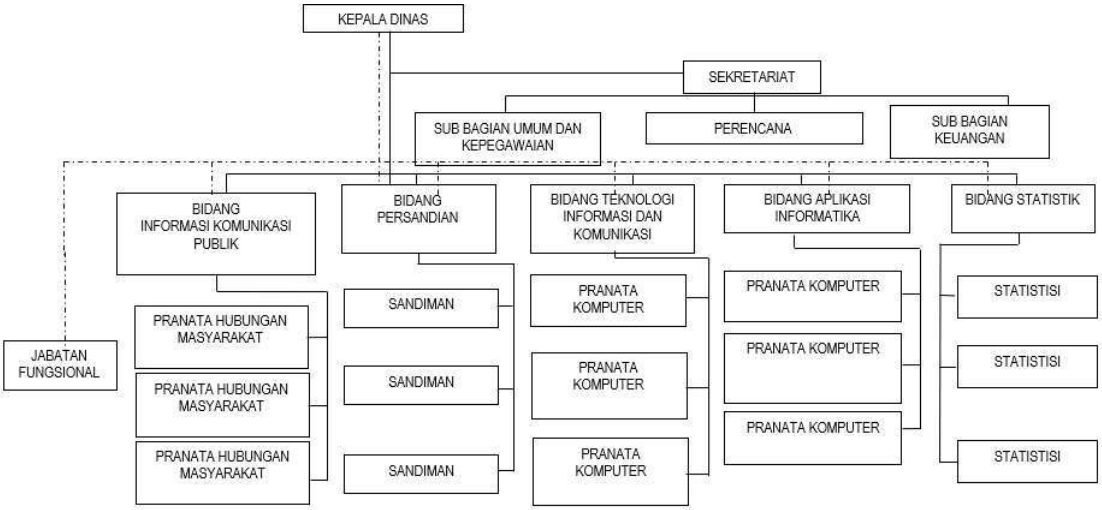
a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;

b. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
c. Program pengelolaan aplikasi informatika;
d. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
e. Program penyelenggaraan statistik sektoral

Kepala Diskominfo, membawahkan:

1. Sekretariat,
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Bidang Persandian;
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Bidang Aplikasi Informatika;
6. Bidang Statistik; dan
7. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian



Sumber : Perbup Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Bandung

2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

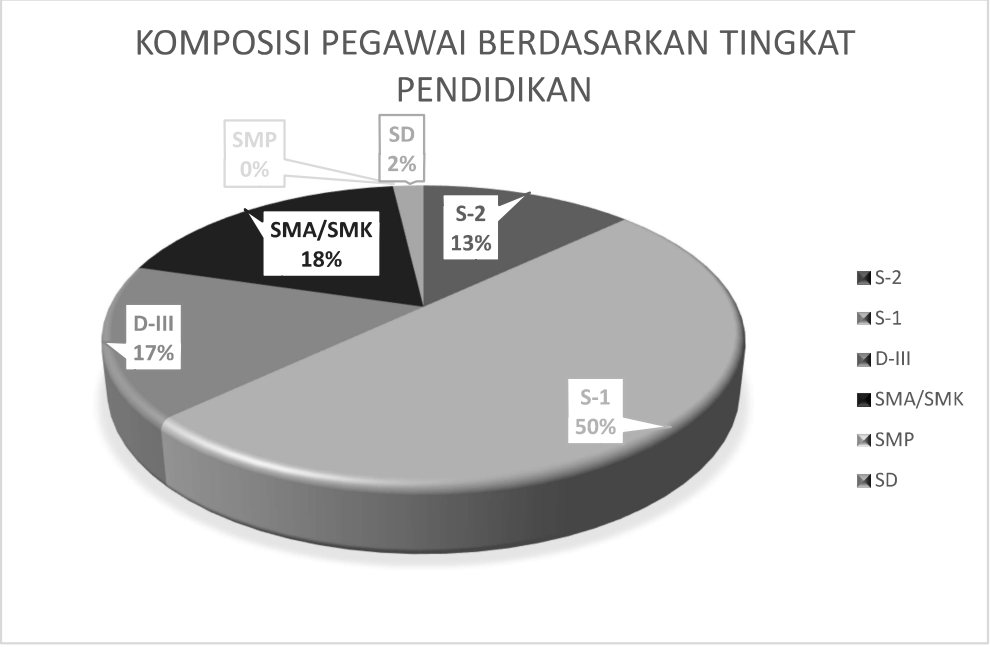
Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung, dalam menjalankan tugas dan fungsi, Diskominfo Kabupaten Bandung didukung oleh 54 orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai bidang keahlian. Jumlah dan komposisi pegawai Diskominfo Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan pendidikan

PENDIDIKAN TERAKHIR	S-2	S-1	D-III	SLTA	SD	JUMLAH TOTAL
JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	2	11	2	2	0	17
JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	6	17	5	8	1	37
TOTAL PEGAWAI	8	28	7	10	1	54

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo 2025

Gambar 2.2 Komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan pendidikan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo 2025

Tabel 2.2 Komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan Golongan Ruang

GOLONGAN RUANG	IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	I d	gol-IX	gol-VII	gol-V	JUMLAH TOTAL
JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	0	4	3	2	2	1	1	1	0	0	0	2	1	0	17
JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	1	5	6	1	5	8	2	1	1	2	1	2	1	1	37
TOTAL PEGAWAI	1	9	9	3	7	9	3	2	1	2	1	4	2	1	54

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung saat ini memiliki jumlah Pegawai 54 orang, yang terdiri dari 47 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 7 orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Tahun Anggaran 2025. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung sebesar 50 % berpendidikan sarjana dan 13% berpendidikan pascasarjana, hal ini merupakan salah satu pendorong dasar untuk menciptakan profesionalisme dalam bekerja.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung didukung dengan sarana dan prasarana, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Secara lebih rinci sarana dan prasarana pendukung yang merupakan asset Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Asset Diskominfo

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	11.247.310.979
3	Gedung dan Bangunan	5.379.478.868
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	612.237.918
5	Aset Tetap Lainnya	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
7	Aset Tak Berwujud	-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	960.927.613
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	-

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
	Total Aset Tetap	17.239.027.765

Sumber : Sub Bagian Keuangan Diskominfo per 31 Desember Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayaanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan pelayanan kepada aparatur dan masyarakat. Pelayanan tentu dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan publik.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian.

Data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) perangkat daerah umumnya mengacu pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diatur dalam peraturan perundangan, seperti UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara umum, urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi tanggung jawab Diskominfo meliputi:

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Pelayanan bidang IKP pada dasarnya mencakup pengelolaan informasi publik, penyiaran dan publikasi, pengelolaan media, serta penguatan literasi digital dan kehumasan pemerintah.

Secara umum, pelayanan IKP berorientasi pada:

- Penyebarluasan Informasi Publik
- Layanan Publikasi
- Layanan Informasi Publik Sesuai UU KIP
- Pengelolaan Media dan Literasi Digital
- Penguatan Diseminasi Informasi Pembangunan

Dengan cakupan tersebut, pelayanan bidang IKP tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi semata, melainkan juga membangun komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar kebijakan, program, dan hasil pembangunan daerah dapat diketahui, dipahami, dan diawasi oleh publik, sekaligus memberi ruang bagi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

2. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berperan dalam penyediaan, pengembangan, serta pemeliharaan infrastruktur dan sistem teknologi informasi pemerintah daerah guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Pelayanan TIK diarahkan untuk memperkuat transformasi digital pemerintahan, menyediakan akses jaringan komunikasi data yang andal, serta memastikan keamanan informasi dan keberlanjutan layanan publik berbasis elektronik.

Secara umum, pelayanan TIK meliputi:

- Pengembangan Infrastruktur Jaringan dan Data Center
- Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SPBE
- Layanan Dukungan Teknis TIK
- Pengelolaan Keamanan Informasi
- Pengelolaan Sistem Komunikasi Pemerintah
- Transformasi Digital dan Inovasi TIK

Dengan cakupan tersebut, pelayanan bidang TIK tidak hanya sebatas penyediaan sarana dan prasarana teknologi, tetapi juga membangun fondasi digital yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik.

3. Bidang Aplikasi Teknik Informatika (APTIKA)

Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) memiliki peran strategis dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian aplikasi serta layanan berbasis teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Aptika berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik digital, integrasi aplikasi pemerintahan, serta penguatan ekosistem keamanan dan tata kelola ruang siber di daerah.

Secara umum, pelayanan Aptika mencakup:

- Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Pemerintahan
- Layanan Publik Digital
- Pengelolaan Data dan Interoperabilitas
- Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber
- Fasilitasi Ekonomi Digital dan Literasi Masyarakat
- Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi

Dengan cakupan tersebut, pelayanan Bidang Aptika tidak hanya berorientasi pada penyediaan aplikasi, tetapi juga memastikan adanya integrasi, keamanan, serta kebermanfaatan aplikasi bagi peningkatan kualitas layanan publik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berdaya saing.

4. Bidang Statistik

Bidang Statistik berperan penting dalam menyediakan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Pelayanan statistik diarahkan untuk memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di daerah, memastikan ketersediaan data sektoral yang memenuhi standar, serta meningkatkan pemanfaatan data oleh perangkat daerah dan masyarakat.

Secara umum, pelayanan bidang Statistik meliputi:

- Pengelolaan Data Statistik Sektoral
- Fasilitasi Implementasi Satu Data Indonesia
- Layanan Data dan Informasi Statistik
- Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Data
- Penguatan Kapasitas dan Literasi Statistik

Dengan cakupan tersebut, pelayanan Bidang Statistik tidak hanya sebatas menyediakan angka atau tabel, tetapi juga membangun sistem tata kelola data yang terpadu, kredibel, dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data (*evidence-based policy*), meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

5. Bidang Persandian

Bidang Persandian memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan sistem pengamanan komunikasi dan informasi. Layanan persandian tidak hanya berfokus pada pengamanan dokumen dan data elektronik, tetapi juga memastikan agar informasi strategis pemerintah terlindungi dari ancaman kebocoran, manipulasi, maupun serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum, pelayanan Bidang Persandian mencakup:

- Pengelolaan Pengamanan Informasi
- Pengelolaan Sistem Persandian dan Keamanan Siber
- Fasilitasi Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Digital
- Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Informasi
- Kerjasama dengan Lembaga Terkait

Dengan cakupan tersebut, pelayanan Bidang Persandian berfungsi sebagai garda terdepan dalam melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, terpercaya, dan berdaya saing.

2.1.3.2 Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan IKU dan IKK tahun 2021 – 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan atau sasaran strategis suatu organisasi, instansi, atau unit kerja. IKU digunakan sebagai alat untuk

mengukur kinerja secara kuantitatif dan kualitatif dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan strategis perangkat daerah. IKU disusun berdasarkan sasaran dan tujuan dalam rencana strategis (Renstra) perangkat daerah, dan digunakan untuk mengukur seberapa efektif kinerja organisasi dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu individu, unit kerja, atau organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKK menjadi alat penting dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Capaian IKU dan IKK Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-11	-12	-13	-16	-17	-18
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				3.15	2.92	3.02	2.82	3.48	3,98	89.52%	105.13 %	131,79 %
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online				32,81	46.88	57.81	50	46.88	68.75	152.39 %	100%	118,84 %
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet				10.69	13.72	17	8,65	13.72	17	80.91%	100%	100%
4	Nilai Indeks KAMI (Tingkat keamanan informasi pemerintah)				45.43	46.98	48.53	45,581	51.62	67,1	100.33 %	109.87 %	138,26 %
5	Indeks Persepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintah daerah				78	79	80	84,49	81.6	88	108.32 %	103.29 %	110%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-11	-12	-13	-16	-17	-18
6	Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi Kaedah Satu Data				27	46	64	27	46	64	100%	100%	100%
7	Nilai AKIP internal (nilai)				72.5	73	73.5	72.71	76.31	80,05	100.28 %	104.53 %	108,91 %

Sumber : Sub Bagian Program Diskominfo tahun 2024

Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung berdasarkan tabel 2.4 pada tahun 2 dan 3 dalam pelaksanaan renstra, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat dikategorikan sangat baik, hal ini tercermin dari pencapaian kinerja Tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan, pada tahun 2023 seluruh target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat dicapai dengan tingkat ketercapaian 100%. Pada Tahun 2024 hampir seluruh target kinerja tercapai sesuai target.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tidak terdapat Indikator Kinerja Kunci pada Rentra Tahun 2021 – 2026.

2.1.3.3 Penyajian hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab PD pada Renstra tahun 2021-2026 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal, Dinas Komunikasi dan Informatik, Statistik dan Persandian melakukan evaluasi terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada publik. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Adapun bentuk pelayanan dan sarana pendukung yang sudah cukup dikenal di kalangan aparatur dan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Dapat dilihat pada tabel tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksankan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian beserta capaian

kinerjanya. Dari data tersebut rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mendapatkan hasil yang sangat baik.

Kemudian pada tabel 2.6 dapat dilihat anggaran dan serapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang mana dari data tersebut dapat dilihat secara transparan anggaran yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam menyediakan layanan.

Tabel 2.5. Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	72.24 Point	72 Point	72,24 Point	100,31%	73 Point	76,30 point	104,53%	73.5 Point	80,05 Point	108,91%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0 Dokumen		

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	3 Laporan	2 Laporan	100,00%	0 Laporan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Diskominfo					1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	100,00%	57 Orang/bulan	57 Orang/Bulan	100,00%	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Diskominfo					12 Dokumen	12 Dokume	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Paket	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	0 Laporan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Diskominfo dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesterean Diskominfo					12 Laporan	12 Laporan	100,00%	0 Laporan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					2 Paket	2 Paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 kegiatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	0 Dokumen		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 kegiatan	1 Orang	1 Orang	100,00%						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1 Orang	1 Orang	100,00%	53 Orang	53 Orang	100,00%	58 Orang	58 Orang	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 jenis	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 paket	3 paket	100,00%	3 Paket	3 Paket	100,00%	3 Paket	3 Paket	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	0 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Jenis	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	1 Paket	100,00%	1 paket	1 Paket	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	1 tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket	100,00%				0 Paket		

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	205 OK	20 Laporan	20 Laporan	100,00%	20 Laporan	20 Laporan	100,00%	20 Laporan	20 Laporan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133 OH	30 Laporan	30 Laporan	100,00%	30 Laporan	30 Laporan	100,00%	30 Laporan	30 Laporan	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu-jumlah dokumen CALK					100%	100%	100,00%			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Unit	0 Unit		1 Unit	1 Unit	100,00%			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	3 Laporan	3 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Orang	10 Laporan	10 Laporan	100,00%	10 Laporan	10 Laporan	100,00%	10 Laporan	10 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset BMD dalam Kondisi Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	18 Unit	18 Unit	100,00%	18 Unit	18 Unit	100,00%			

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00%	4 Unit	4 Unit	100,00%	18 Unit	20 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	5 Unit	5 Unit	100,00%	5 Unit	5 Unit	100,00%	3 Unit	3 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	100%
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Presepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah		78	79,19	101,52%	79	81.60	103,29%	80	88	110%
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		1 dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 dokumen	1 Dokumen	100%
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		12 Bulan	12 Bulan	100,00%	1 dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 dokumen	1 Dokumen	100%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		12 Bulan	12 Bulan	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		80%	80%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		5 Publikasi	5 Publikasi	100,00%	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	1 Layanan	1 Layanan	100%
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi yang Meningkat Kapasitasnya		100 Orang	50 Orang	50%	50 Orang	50 Orang	100,00%	100 Orang	100 Orang	100%

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penyediaaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	100,00%	27 Unit	24 Unit	88,89%
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	8,59	10,69	8,65	80,91%	13,72	13,72	100%	17	17%	100%
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet	32,81	32,81	50%	152,39%	46,88	46,88	100%	57,81	68,71%	118,84%
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai		100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		12 Bulan	12 Bulan	100,00%	1 domain	1 Domain	100,00%	1 domain	1 Domain	100%
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten		3 Paket	3 Paket	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	65 Unit	65 Unit	100,00%	65 Unit	65 Unit	100%

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi penunjang e-government terbangun dan terpelihara	6 Aplikasi	8 Aplikasi	9 Aplikasi	113%	9 Aplikasi	9 Aplikasi	100,00%	9 Aplikasi	9 Aplikasi	100%
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2 dokumen	4 Dokumen	200%	6 Dokumen	4 Dokumen	66,67%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	100%
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		65 Perangkat Daerah	65 Perangkat daerah	100,00%	65 Perangkat Daerah	65 Perangkat daerah	100,00%	65 Perangkat Daerah	65 Perangkat Daerah	100%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		8 Unit	8 Unit	100,00%	9 Unit	9 Unit	100,00%	7 Unit	7 Unit	100%
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterlan Smart City		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			0					2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi kaedah Satu Data	20%	27%	27%	100%	46%	46%	100,00%	64%	64%	100%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data danmetadata	2538	3548	3548 Data	100,00%	5.897	5897 Data	100,00%	8.246	8.246	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		3 dokumen	3 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		1 dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS										
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun		1 dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	43,88%	45,43%	45,58%	100,33%	46,98%	51,62%	109,87%	48,53%	67,10%	138,26%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan persandian		100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan		3 dokumen	3 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		7 Orang	7 Orang	100,00%						
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		100%	100%	100%	65 Perangkat Daerah	65 Perangkat Daerah	100,00%	65 Perangkat Daerah	65 Perangkat Daerah	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program					100,97%			99,79%			100,73%
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi

Sumber : Sub Bagian Program Diskominfo 2024

Tabel 2.6 Capaian Serapan Anggaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung Tahun 2022 – 2024

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.789.225.058	20.809.925.489	91,31%	14.636.681.321	10.651.953.506	72,78%	14.987.982.509	14.670.568.088	97,88%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.249.000	75.162.200	98,57%	23.250.000	11.710.000	50,37%	24.650.000	24.559.000	99,63%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.369.000	9.369.000	100,00%	3.250.000	3.000.000	92,31%	9.000.000	9.000.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.250.000	27.432.800	97,11%	4.000.000	3.400.000	85,00%			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	28.250.000	27.980.500	99,05%	4.000.000	1.720.000	43,00%			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.000.000		0,00%			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				4.000.000		0,00%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.380.000	10.379.900	100,00%	2.000.000	2.000.000	100,00%			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000	1.590.000	79,50%	15.650.000	15.559.000	99,42%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.788.471.189	11.785.864.658	92,16%	12.230.606.352	9.447.043.659	77,24%	12.233.121.158	12.230.643.158	99,98%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.757.401.189	11.754.794.758	92,14%	12.208.231.352	9.437.256.459	77,30%	12.220.871.158	12.220.871.158	100,00%

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.250.000	4.300.000	68,80%	12.250.000	9.772.000	79,77%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.070.000	31.069.900	100,00%	5.375.000	3.487.200	64,88%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10.750.000	2.000.000	18,60%			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.775.000	33.507.000	96,35%	56.109.600	26.920.000	47,98%	162.336.510	150.814.000	92,90%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				20.493.000	20.420.000	99,64%	80.000.000	79.960.000	99,95%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	22.815.000	21.807.000	95,58%	13.000.000	6.500.000	50,00%			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.960.000	11.700.000	97,83%						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0			22.616.600	0	0,00%	82.336.510	70.854.000	86,05%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.651.000	428.223.982	99,44%	596.291.509	207.427.200	34,79%	493.118.841	443.565.674	89,95%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.499.200	99,99%	5.000.000	4.932.400	98,65%	20.000.000	19.999.900	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	334.057.000	332.124.316	99,42%	456.098.009	104.216.900	22,85%	198.773.100	193.187.999	97,19%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000	4.975.000	99,50%	10.000.000	10.000.000	100,00%

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	9.995.300	99,95%	10.000.000	6.865.800	68,66%	40.000.000	30.400.000	76,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.800.000	24.799.800	100,00%	10.000.000	7.600.000	76,00%	40.000.000	39.908.000	99,77%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.180.000	1.420.000	15,47%	52.240.000	50.482.900	96,64%
Penyediaan Bahan/Material									
Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.500.000	19.350.000	99,23%	13.000.000	13.000.000	100,00%	14.323.938	14.170.000	98,93%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.794.000	34.455.366	99,03%	88.013.500	64.417.100	73,19%	117.781.803	85.416.875	72,52%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			804.579.600	114.600.000	14,24%			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				600.000.000,00		0,00%			
Pengadaan Mebel	-			204.579.600	114.600.000	56,02%			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.172.791.869	8.226.347.049	89,68%	4.026.561.000	699.142.147	17,36%	1.534.938.000	1.385.665.057	90,27%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.658.000	1.100.000	66,34%	1.650.000	1.330.000	80,61%	2.000.000	2.000.000	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.842.633.869	7.896.785.929	89,30%	3.545.511.000	306.258.897	8,64%	530.000.000	388.662.737	73,33%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	328.500.000	328.461.120	99,99%	479.400.000	391.553.250	81,68%	1.002.938.000	995.002.320	99,21%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.287.000	260.820.600	91,10%	650.170.181	145.110.500	22,32%	539.818.000	435.321.199	80,64%

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.279.000	198.882.100	95,03%	197.590.000	91.794.100	46,46%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.000.000	28.788.500	89,96%	43.000.000	23.578.400	54,83%	169.810.000	164.663.200	96,97%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.008.000	33.150.000	94,69%	44.770.000	29.738.000	66,42%	70.008.000	69.408.000	99,14%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000		0,00%	364.810.181	0	0,00%	300.000.000	201.249.999	67,08%
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.928.754.000	2.805.320.966	95,79%	18.387.568.242	1.958.987.310	10,65%	10.781.921.415	10.701.187.081	99,25%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.928.754.000	2.805.320.966	95,79%	3.175.962.818	1.958.987.310	61,68%	10.781.921.415	10.701.187.081	99,25%
Perunusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	6.500.000	6.500.000	100,00%	3.175.962.818	0	0,00%	204.500.000	203.813.800	99,66%
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	112.750.000	34.125.000	30,27%	13.000.000	48.000.000	369,23%	338.305.400	275.977.730	81,58%
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	410.020.000	407.382.250	99,36%	66.650.000	530.652.250	796,18%	2.776.973.330	2.613.118.500	94,10%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	322.950.000	321.990.000	99,70%	645.681.500	262.880.000	40,71%	1.185.375.685	1.097.583.861	92,59%
Pelayanan Informasi Publik	96.660.000	95.276.500	98,57%	468.000.000	96.761.060	20,68%	123.837.816	123.351.700	99,61%
Layanan Hubungan Media	484.534.500	453.106.000	93,51%	186.794.000	997.464.000	533,99%	5.258.733.200	5.661.502.990	107,66%

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	7.170.000	6.880.000	95,96%	1.529.901.318	7.500.000	0,49%	137.184.000	91.484.000	66,69%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	25.002.500	24.575.000	98,29%	37.738.000	6.500.000	17,22%	53.898.000	50.218.000	93,17%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	6.500.000	1.455.486.216	99,48%	68.558.000	9.230.000	13,46%	97.139.280	70.693.000	72,77%
Penyediaaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab / Kota				10.000.000	0	0,00%	605.974.704	513.443.500	84,73%
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	4.289.885.500	3.950.222.731		6.880.187.292	3.639.283.250	52,90%	11.759.844.844	13.592.838.901	115,59%
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.729.960.000	1.469.592.427		4.813.022.292	2.587.181.391	53,75%	8.645.289.844	9.183.146.609	106,22%
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	194.055.000	143.970.953		199.507.000	148.813.522	74,59%	49.735.000	46.313.300	93,12%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.435.905.000	1.238.228.341		4.562.214.292	2.424.983.845	53,15%	60.000.000	55.273.619	92,12%
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	87.393.133		51.301.000	13.384.024	26,09%	8.535.554.844	9.081.559.690	106,40%

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.559.925.500	2.480.630.304	96,90%	2.067.165.000	1.052.101.859	50,90%	3.114.555.000	4.409.692.292	141,58%
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				149.460.000,00	9.000.000,00	6,02%	144.780.000	144.380.000	99,72%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	228.824.000	210.473.662	91,98%	269.414.000,00	45.330.000,00	16,83%	105.854.000	105.854.000	100,00%
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				50.000.000,00	5.430.000,00	10,86%	50.000.000	49.608.000	99,22%
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	639.225.000	639.225.000	100,00%	774.300.000,00	577.200.000,00	74,54%	654.380.000	634.260.000	96,93%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.591.876.500	1.530.947.250	96,17%	368.491.000,00	260.005.960,00	70,56%	1.725.191.000	3.041.240.292	176,28%
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas				100.500.000,00	29.672.000,00	29,52%	100.500.000	100.500.000	100,00%
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				255.000.000,00	76.061.399,00	29,83%	204.350.000	204.350.000	100,00%
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)							50.000.000	50.000.000	100,00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	100.000.000	99.984.392	99,98%	100.000.000,00	49.402.500,00	49,40%	79.500.000	79.500.000	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.258.261.000	1.238.829.375	98,46%	1.229.760.500	737.010.700	59,93%	1.169.961.261	1.169.097.280	99,93%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.258.261.000	1.238.829.375	98,46%	1.229.760.500	737.010.700	59,93%	1.169.961.261	1.169.097.280	99,93%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1.031.721.000	1.022.834.375	99,14%	582.303.000	430.969.000	74,01%	516.072.461	516.071.600	100,00%
Membangun Metadata Statistik Sektoral	169.540.000	167.095.000	98,56%	384.940.000	144.580.200	37,56%	407.932.400	407.431.480	99,88%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	57.000.000	48.900.000	85,79%	262.517.500	161.461.500	61,51%	245.956.400	245.594.200	99,85%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	762.896.000	760.942.560	99,74%	830.896.000	418.658.680	50,39%	1.068.037.967	1.008.071.623	94,39%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	762.896.000	760.942.560	99,74%	830.896.000	418.658.680	50,39%	1.068.037.967	1.008.071.623	94,39%
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	144.285.000	144.010.500	99,81%	192.795.000	169.717.200	88,03%	197.129.830	188.865.200	95,81%

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	389.926.000	389.794.560	99,97%	457.926.000	114.100.480	24,92%	573.880.035	524.255.000	91,35%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180.175.000	179.137.500	99,42%	180.175.000	134.841.000	74,84%	297.028.102	294.951.423	99,30%
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.510.000	48.000.000	98,95%						
Rata-rata Serapan Anggaran	-		93,51%	-		68,13%	-		96,66%

Sumber : Sub Bagian Program Diskominfo 2024

Anggaran dan realisasi Diskominfo dari Tahun 2022-2024 yang disajikan pada tabel 2.5 dan 2.6 termasuk baik dan mencapai capaian kinerja rata-rata diatas 96 %. Sedangkan rata-rata pertumbuhan Anggaran mengalami fluktuatif karena sering berubahnya pagu yang ditetapkan dan terjadinya perubahan Anggaran sesuai prioritas pada tahun berjalan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung sangat luas. Secara umum, kelompok sasaran tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung: Diskominfo memiliki peran penting dalam mendukung kinerja OPD lain melalui penyediaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sistem informasi, dukungan teknis, serta pelatihan terkait TIK.
2. Media Massa (Cetak, Elektronik, dan *Online*): Diskominfo menjalin kemitraan dengan media massa untuk penyebarluasan informasi publik yang akurat dan berimbang, serta membangun hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan pers.
3. Komunitas dan Kelompok Masyarakat Tertentu: Diskominfo juga dapat menyasar kelompok masyarakat tertentu seperti komunitas Relawan TIK untuk memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka atau memfasilitasi pemanfaatan TIK dalam kegiatan mereka. Selain itu Diskominfo aktif membina Kelompok Informasi Masyarakat KIM di tingkat desa dan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan. KIM berperan sebagai fasilitator, mitra pemerintahan desa, penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, serta memperlancar arus informasi di tingkat lokal. Sebagai contoh, KIM Tarumajaya di Kecamatan Kertasari telah berhasil mengembangkan program seperti layanan internet berlangganan desa, wisata edukasi kopi, dan perpustakaan desa yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat
4. Masyarakat Umum: Ini adalah kelompok sasaran yang paling

luas, mencakup seluruh warga Kabupaten Bandung. Pelayanan untuk masyarakat umum dapat berupa penyediaan informasi publik melalui berbagai saluran (*website*, media sosial, papan pengumuman), sosialisasi program pemerintah, layanan pengaduan, serta peningkatan literasi digital.

2.1.5 Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam Pemberian Pelayanan

Merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dan berkolaborasi dengan perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, Diskominfo Kabupten Bndung dalam pemberian pelayanan bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo, khususnya dalam hal pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Berikut adalah bebera mitra Diskominfo dalam pemberian layanan:

1. Instansi Pemerintah Lain (Internal Pemerintah Daerah)
   - Perangkat Daerah (PD) Lainnya – Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, dll., sebagai pengguna atau pemberi informasi yang dikelola Diskominfo.
   - Inspektorat & BKAD – dalam konteks transparansi informasi dan integrasi sistem pelaporan keuangan dan kinerja.
   - Bagian Humas atau Protokol Sekretariat Daerah – untuk sinergi dalam pengelolaan informasi publik dan kehumasan.
2. Lembaga Vertikal dan Regulator
   - Kementerian Komdigi RI – sebagai pembina teknis dan sumber kebijakan nasional.
   - BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) – khususnya dalam layanan persandian dan keamanan informasi.
   - BPS (Badan Pusat Statistik) – dalam integrasi dan sinkronisasi data statistik sektoral.

   3. Media Massa dan Jurnalis
   - Media Cetak, Elektronik, dan *Online* – sebagai mitra penyebarluasan informasi publik.
   - Forum Jurnalis Daerah / Persatuan Wartawan Indonesia / Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia – dalam menjamin transparansi dan keterbukaan informasi.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas

- LSM di bidang keterbukaan informasi publik, literasi digital, atau pengawasan layanan publik.
- Komunitas IT, KIM, pegiat media sosial, dan penggiat literasi digital.

5. Dunia Usaha dan Swasta

- Penyedia Layanan TIK (seperti penyedia jaringan internet, *cloud services*, server, aplikasi *e-government*).
- Vendor Aplikasi dan Sistem Informasi – pengembang aplikasi layanan publik, *e-office*, SPBE, dll.

6. Masyarakat Umum dan Pengguna Layanan

- Warga atau pengguna sistem informasi (misalnya layanan aduan online, website resmi, aplikasi layanan publik).
- Kelompok masyarakat seperti RT/RW, tokoh masyarakat, atau relawan informasi.

2.1.6 Kerja sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Berikut beberapa perjanjian Kerjasama yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terkait urusan pada Diskominfo Kabaupaten Bandung, diantaranya :

1. Universitas Institut Pertanian Bogor (program studi Statistik) terkait Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia per-Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung.
2. Universitas Pendidikan Indonesia (program studi Survey Pemetaan dan Informasi Geografi – fakultas IPS) terkait Pengelolaan Data Geospasial.
3. Badan Standardisasi Nasional (BSN) terkait Penyusunan Nota Kesepakatan dan Recana Kerja Replikasi Sitem Informasi Portal Satu Data Kabupaten Bandung Pada Portal Satu Data Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Badan Standardisasi Nasional
4. *Tell-University* (Universitas Telkom) terkait Penyusunan Dokumen Pemerintahan Digital.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Diskominfo

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dihadapkan pada berbagai

permasalahan dan tantangan yang perlu diidentifikasi secara komprehensif. Permasalahan yang ada menuntut adanya langkah strategis yang tepat dan adaptif. Oleh karena itu, analisis permasalahan dan isu strategis menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan program kerja Diskominfo ke depan.

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung masuk dalam bagian 3 Prioritas Nasional diantaranya :

1. Prioritas 1 Nasional yaitu : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Prioritas 2 Nasional yaitu : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas 7 Nasional yaitu : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

Pada Prioritas 1 Nasional Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Mendukung dengan adanya beberapa sub kegiatan yaitu :

- Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pada Prioritas 2 Nasional sub kegiatan yang mendukung yaitu:

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Kemudian pada Prioritas 7 Nasional subkegiatan yang dilaksanakan Diskominfo yang mendukung prioritas tersebut yaitu:

- Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
- Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan

Persandian Pemerintah Daerah

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dalam rancangan Strategi Kementrian Komdigi dilakukan kesesuaian antara Renstra Diskominfo terhadap Renstra Kementerian Komdigi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Digital Daerah

- Kementerian Komdigi Pusat : Mendorong adopsi transformasi digital lintas sektor melalui SPBE, pusat data nasional, layanan digital publik.
- Diskominfo Kabupaten Bandung : Umumnya mulai menerapkan SPBE daerah, namun banyak daerah belum memiliki arsitektur SPBE yang lengkap.

Analisis:

- Ada kesesuaian dalam arah kebijakan, tetapi masih ada Kesenjangan implementasi.
- Perlu dukungan teknis dari pusat untuk arsitektur SPBE, interoperabilitas data, dan aplikasi layanan publik digital.

2. Pemerataan Akses TIK

- Kementerian Komdigi Pusat : Fokus pada penyediaan infrastruktur 4G, internet desa, dan proyek Palapa Ring/SATRIA.
- Diskominfo Kabupaten Bandung : Fokus pada pemanfaatan infrastruktur, pengembangan jaringan lokal, dan pemantauan titik blank spot melalui pemanfaatan teknologi geospasial.

Analisis:

- Daerah sangat tergantung pada program pusat.
- Sebagian daerah mulai inisiasi infrastruktur mandiri (misalnya menara bersama, pemda *fiber optic*), tapi anggaran terbatas.

3. Literasi Digital dan SDM TIK

- Kementerian Komdigi Pusat : Menyelenggarakan program DTS, Literasi Digital Nasional, *Digital Leadership Academy*.
- Diskominfo Kabupaten Bandung : Mulai melaksanakan pelatihan digital, tapi jangkauan terbatas dan kadang tidak berkelanjutan.

Analisis:

- Tujuan sama, tapi pelaksanaannya belum terintegrasi.
- Perlu MoU dan kerjasama program pusat-daerah agar

program literasi digital tepat sasaran.

Telaahan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, mengacu pada Indikator Kinerja Program RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, meliputi komunikasi, informatika, persandian dan statistik sektoral berdasarkan asas otonomi, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dengan semangat itu, maka Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk periode waktu 2025-2029 akan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu "Jawa Barat Istimewa Lembur Diurus Kota Ditata". Untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, DIKSOMINFO Provinsi Jawa Barat mendukung pencapaian misi ke- 4 Gubernur Jawa Barat yaitu : Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*. Melalui tujuan : Terciptanya transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan bersih untuk mewujudkan ketahanan daerah. Adapun sasaran yang akan dicapai diantaranya yaitu :

- Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif;
- Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas;
- Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Visi Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas". Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung diatas, misi yang secara langsung berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah misi 3. Secara jelas maka penjabaran misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 3 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses dan keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit,

serta pemerintah siap memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Berikut adalah analisis keselarasan antara Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana strategi Diskominfo mendukung perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah di Kabupaten Bandung.

RTRW Kabupaten Bandung :

- Meningkatkan kualitas ruang hidup masyarakat.
- Mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan ekonomi dan sosial.
- Melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur wilayah.

Dukungan Renstra Diskominfo terhadap RTRW Kabupaten Bandung adalah :

- Pengembangan infrastruktur TIK untuk mendukung pembangunan wilayah.
- Peningkatan layanan publik berbasis digital.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk perencanaan dan pengawasan Pembangunan.
- Pengembangan sistem informasi geografis (SIG) untuk perencanaan tata ruang.

Keselarasan antara RTRW Kabupaten Bandung dengan Renstra Diskominfo adalah Renstra Diskominfo memiliki indikator yang mendukung pencapaian IKU RTRW, terutama dalam aspek peningkatan akses terhadap infrastruktur dan fasilitas publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Diskominfo Kabupaten Bandung

Diskominfo memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan lingkungan KLHS melalui digitalisasi (penghematan kertas, efisiensi administratif), promosi informasi lingkungan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring lingkungan.

Keselarasan:

Penggunaan Energi: Kegiatan seperti pengoperasian data center, jaringan BTS, dan pusat kernet memiliki konsumsi energi yang signifikan. Renstra Diskominfo perlu menunjukkan komitmen untuk memprioritaskan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, atau menggunakan penyuplai energi yang berkelanjutan, sejalan dengan potensi anjuran KLHS.

Pengelolaan *E-Waste*: Program yang melibatkan pengadaan peralatan elektronik (PC, server, perangkat jaringan) atau penggantian perangkat lama harus diikuti dengan strategi pengelolaan *Electronic Waste* (*e-waste*) yang jelas dan ramah lingkungan (penyortiran, daur ulang, penghancuran aman). Ini harus sesuai dengan pedoman pengelolaan limbah yang mungkin diusulkan dalam KLHS.

Pengurangan Kertas (*Go Green*): Program digitalisasi (e-dokumen, e-formulir, e-permohonan) secara inheren harus berdampak positif pada pengurangan penggunaan kertas dan arah kebijakan lingkungan. Keselarasan terlihat jika program ini secara eksplisit diarahkan sebagai upaya "*go green*".

Penggunaan Lahan: Jika ada rencana pengembangan infrastruktur fisik (misalnya, pembangunan kantor baru, pusat komputasi skala besar), perlu dilihat apakah lokasi dan penggunaan lahan sesuai dengan zonasi dan arahan pengembangan fisik Kabupaten Bandung yang diusulkan dalam KLHS, serta meminimalkan dampak terhadap ekosistem setempat.

2.2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di Diskominfo yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian selama ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum terpenuhinya kapasitas SDM, kompetensi dan sarana prasarana	Belum ada penerapan standarisasi sarana prasarana ruang kerja/kantor.	Belum sesuainya standar ruang kantor dan sarana mobilitas untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan.
		Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai dengan standar kebutuhan satuan unit kerja.	Penempatan SDM yang tidak linier dengan pendidikan, kurangnya bimbingan dan pelatihan bagi ASN.
			Dokumen Perencaan yang belum maksimal sesuai dengan kebutuhan Dinas.
2	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Perangkat daerah belum membudayakan transparansi dan akuntabilitas	Perangkat daerah belum memahami keterbukaan informasi publik
			Pengelola dokumentasi tidak sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan
			Sarana prasarana pendukung di perangkat daerah belum sesuai kebutuhan
			Masih ditemukannya aduan / informasi / aspirasi publik melalui layanan aduan terintegrasi masyarakat yang tidak direspon Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku
		Fungsi diseminasi informasi dan komunikasi publik belum mendorong peningkatan standar hidup masyarakat	Kabupaten Bandung belum memiliki City Branding yang mengakar ke seluruh sektor kehidupan masyarakat
			Kurang kapasitas dan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan diseminasi informasi
3	Belum Optimalnya Penyelanggaraan Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya penyelanggaraan APTIKA (Aplikasi dan Informatika)	Belum Optimalnya Implementasi Regulasi dan Kebijakan Aptika
			Belum optimalnya tatalaksana layanan infrastruktur TIK

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			Belum Optimalnya implementasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
			Belum optimalnya integrasi Aplikasi dan Pengelolaan Database Aplikasi
			Belum Optimalnya Digitalisasi penunjang Ekosistem TIK
			Masih Terbatasnya kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia TIK
			Belum Optimalnya NSPK (Norma, Standar, Kriteria, Prosedur), Pengelola Layanan Pusat Data, Pengelola Layanan Pusat Pemulihan Bencana (DRC), Pengelola Layanan Webhosting dan Domain bandungkab.go.id, Pengelola Jaringan Intra Pemerintah, Pengelola Jaringan Komunikasi Pemerintah
		Belum optimalnya layanan Infrastruktur TIK di Kabupaten Bandung	Belum optimalnya layanan Jaringan Intra Pemerintah
			Belum optimalnya layanan Pusat Data ; Layanan Pusat Pemulihan Bencana (DRC); Layanan Webhosting dan Domain bandungkab.go.id
4	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Belum ada kebijakan tata kelola Keamanan informasi dan persandian	Masih kurangnya peraturan/regulasi sebagai bentuk kebijakan tata kelola manajemen operasional keamanan informasi dan persandian
		Masih Kurangnya tingkat Keamanan informasi dan persandian	Kurangnya SDM dalam bidang keamanan informasi dan persandian
			Kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada internal Perangkat daerah terkait keamanan informasi dan persandian
			Kurangnya sarana dan prasarana di bidang keamanan informasi dan persandian
5	Belum terpenuhinya standar kualitas data statistik	Belum Optimalnya Pengumpulan data Statistik	Data yang dihasilkan oleh Perangkat daerah kurang akurat dan konsisten
			Belum adanya portal data yg mendukung terwujudnya satu data

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			Belum optimalnya pemanfaatan portal satu peta
			Adanya perbedaan data pada beberapa Perangkat Daerah
			Data masih banyak yang belum menyajikan secara seri sehingga sangat menyulitkan dalam pengolahan Analisa
			Data belum semuanya memenuhi kebutuhan untuk perencanaan pembangunan
			Belum adanya standarisasi dalam penyajian dan pelaporan data statistik
			Belum optimalnya pengelola data statistik di perangkat daerah
			Masih rendahnya pemahaman terhadap Data statistik Sektoral
			Belum optimalnya pelaksanaan Forum Data
			Belum adanya portal data yg mendukung terwujudnya satu data
			Adanya perbedaan data pada beberapa Perangkat Daerah
			Belum Adanya Standarisasi & metadata
		Belum Optimalnya Pengolahan Anaslisa data Statistik	Masih kurangnya data untuk mendukung pengolahan analisa
			Data masih banyak yang belum menyajikan secara seri sehingga sangat menyulitkan dalam pengolahan Analisa
			Belum ada Pedoman yg mengatur secara inplisit terhadap pelaksanaan kegiatan bid.statistik
		Belum Optimalnya Penyajian dan Pelaporan data Statistik	Belum Tersedianya SDM Pengelola Data spasial spasifikasi survei pemetaan
		Sumber Daya Manusia (SDM) Sarana dan Prasarana	Kurangnya fasilitasi pelatihan / pendidikan
			Ruangan masih belum memenuhi kriteria yang nyaman

Sumber : Sub Bagian Program Diskominfo

2.2.7 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama, tantangan, atau peluang signifikan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dan kinerja perangkat daerah. Isu ini dapat bersumber dari hasil evaluasi capaian sebelumnya, perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, kebijakan nasional dan provinsi, maupun aspirasi masyarakat. Telaahan terhadap isu strategis dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan disusun secara responsif, relevan, dan berbasis pada kebutuhan. Dengan mengidentifikasi isu strategis secara tepat, perangkat daerah dapat menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta mendukung pencapaian pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam perumussan Isu Strategis Diskominfo, ada beberapa Isu Global, Nasional, dan regional yang dihadapi.

- Isu Global
  1. Kesenjangan Akses Internet dalam Melaksanakan Pemerintahan Digital

     Tahun 2023 masih ada 2,6 miliar orang belum terhubung internet (ITU). Sementara Indonesia berada pada skor 0,77 (*High*) di *E-Participation index 2022,* masih tertinggal dari negara maju. Global masih memiliki tantangan terkait kesenjangan akses internet, kualitas layanan pemerintah digital, dan isu keamanan data.
  2. Keterbukaan Informasi & Partisipasi Digital

     Menurut UN E-Government Survey 2022, tingkat partisipasi masyarakat melalui platform digital (e-participation index) masih timpang: negara maju jauh lebih tinggi dibanding negara berkembang. Data: E-Participation Index (2022) juga menyebutkan Denmark, Korea Selatan, dan Estonia masuk kategori very high (>0.9), sementara Indonesia berada di kategori high dengan skor 0.77. Termasuk juga kesenjangan akses Internet dan literasi digital membatasi partisipasi masyarakat.
  3. Kesiapan SDM untuk ekonomi digital

     Mengenai Literasi & Keterampilan Digital Menurut UNESCO, 90% pekerjaan masa depan akan memerlukan keterampilan digital, tetapi di negara berkembang banyak masyarakat

belum siap. Sementara Tahun 2025 ini kontribusi digital global diperkirakan mencapai US$23 triliun.

4. Kepercayaan Publik dan Transparansi

   Menurut CPI (*Corruption Perceptions Index*) 2023 skor dunia rata-rata 43/100. Akuntabilitas masih menjadi isu global. Menurut OECD 2022 tantangan global saat ini adalah membangun kepercayaan public terhadap layanan digital pemerintah.

5. Kesenjangan Infrastruktur

   Menurut ITU (2023), 95% populasi dunia tertinggal di area dengan sinyal seluler, tapi hanya 67% yang benar-benar online.

- Isu Nasional

1. Kesenjangan Akses Internet dalam Melaksanakan Pemerintahan Digital

   Penetrasi akses internet Indonesia ada pada 79,5% (221 Juta pengguna), tapi kesenjangan desa-kota masih tinggi (APJII 2024). Indeks Keterbukaan Informasi Publik berada pada 77,22 (baik) di 2023, artinya akses informasi makin terbuka (Komisi Informasi Pusat). Indeks SPBE Nasional juga ada pada 2,35 (baik) pada 2023, tapi implementasi daerah belum merata.

2. Tingkat Keterlibatan Publik dalam Layanan Digital

   Menurut APJII 2024, penetrasi Internet Indonesia sudah 79,5% (221 juta pengguna). Namun, masih ada kesenjangan pemanfaatan layanan digital antara desa-kota dan kelompok usia. Indeks SPBE Nasional 2023 juga terlihat mencapai 2,35 (kategori baik), tapi partisipasi publik dalam aplikasi pemerintahan belum optimal karena isu literasi digital dan kualitas layanan. Kemudian berdasarkan Survei Katadata Insight 2023 hanya sekitar 36% masyarakat merasa suaranya cukup didengar melalui kanal pengaduan publik digital.

3. Rendahnya Literasi Digital & UMKM Digitalisasi

   Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2023 mencapai 3,65 (skala 1-5) yaitu kategori sedang. Kemudian UMKM Go Digital baru sekitar 30% dari 65 Juta UMKM yang masuk ekosisetem digital (KemenkopUKM 2023). Digitalisasi pemerintahan masih belum merata.

4. Presepsi Korupsi & Efektivitas Kanal Layanan Publik

   Indeks Presepsi Korupsi Indonesia tahun 2023 ada pada 34/100 (peringkat 115 dunia). Sementara terkait pelayanan publik digital survei dari Katadata Insight tahun 2023, hanya 36% masyarakat merasa kanal pengaduan pemerintah yang efektif.

- Isu Regional

1. Kesenjangan Literasi Digital antar daerah perkotaan dan pedesaan

   Provinsi Jawa Barat mengembangkan Aplikasi untuk layanan publik digital diantaranya aplikasi Pikobar juga aplikasi Sapawarga untuk kanal aspirasi masyarakat. Selain itu ribuan dataset juga sudah tersedia di aplikasi Satu Data Jabar tapi pemanfaatannya belum sebanding dengan jumlah penduduk (50 juta+). Meskipun Indeks SPBE Jabar ada pada 3,54 Poin (sangat baik) pada 2023, namun kesenjangan antar daerah perkotaan dan pedesaan masih terasa.

2. Digitalisasi Layanan & Partisipasi Masyarakat

   Jawa Barat dikenal dengan program "*Jabar Digital Service* (JDS)" yang mengembangkan aplikasi Pikobar (awal untuk COVID-19, lalu melebar ke layanan publik lain). Aplikasi Pikobar pernah mencatat lebih dari 1 juta unduhan dan ratusan ribu interaksi warga dalam menyampaikan laporan/gejala/aduan. abar juga memiliki program "Satu Data Jabar" untuk keterbukaan data, tetapi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan data masih rendah (hanya puluhan ribu unduhan dataset dibanding jumlah penduduk Jabar yang 50 juta+). Namun isu kesenjangan literasi digital di daerah pedesaan membuat pemanfaatan layanan digital tidak merata.

3. Kesenjangan desa-kota dan UMKM non-digital masih besar

   Wilayah pedesaan Jabar, terutama di selatan, masih menghadapi keterbatasan akses internet stabil. Provinsi Jabar juga memiliki >4 Juta UMKM, tetapi menurut Disperindag Jabar, baru sekitar 25% yang benar-benar aktif di platform digital.

4. Pemanfaatan Perkembangan Teknologi yang belum merata

Berdasarkan SPBE dan inovasi digitalnya Jawa Barat sudah sangat baik, tapi hal ini belum dapat dirasakan secara merata oleh penduduk Jawa Barat. Kesenjangan literasi digital desa-kota yang ada di Jawa Barat berdampak besar pada akses dan akuntabilitas layanan.

Berikut merupakan Isu Strategis Diskominfo

Tabel 2.8 Isu Strategis Diskominfo

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Diskominfo	Permasalahan	Isu klhs yang relevan dengan Diskominfo	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan pd			Isu strategis Diskominfo
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Akses Informasi dan Layanan Pemerintah	Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang transparan dan paritisipatif	Kesenjangan Akses Internet Dalam Melaksanakan Pemerintahan Digital	Kesenjangan Akses Internet dalam Melaksanakan Pemerintahan Digital	Kesenjangan Literasi Digital antar daerah perkotaan dan pedesaan	Literasi Digital, Peningkatan Keamanan Informasi dalam penyediaan layanan, Penguatan Infrastruktur TIK
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat 2. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 3. Kesenjangan Komunikasi antara Pemerintah and Masyarakat 4. Rendahnya literasi politik dan literasi digital masyarakat	1. *Good governance* 2. Kesetaraan akses partispasi 3. Peningkatan kualitas lingkungan sosial 4. Keberlanjutan pembangunan	Keterbukaan Informasi & Partisipasi Digital	Tingkat Keterlibatan Publik dalam Layanan Digital	Digitalisasi Layanan & Partisipasi Masyarakat	1. Pemanfaatan e-lapor 2. Literasi Digital 3. Transparansi dan Keterbukaan Informasi 4. Peningkatan Kepercayaan Publik
Pemberdayaan Masyarakat Melalui TIK	Rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan data/informasi	Peningkatan kualitas hidup	Kesiapan SDM untuk ekonomi digital	Rendahnya Literasi Digital & UMKM Digitalisasi	Kesenjangan desa-kota dan UMKM non-digital masih besar	1. Pemerataan infrastruktur TIK 2. Program literasi digital berkelanjutan 3. Penguatan keamanan informasi & perlindungan data pribadi
Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas Pelayanan	Layanan publik masih lambat, birokratis, dan tidak efisien	1. Efisiensi sumber daya 2. Kualitas lingkungan sosial	Kepercayaan Publik dan Transparansi	Presepsi Korupsi & Efektivitas Kanal Layanan Publik	Pemanfaatan Perkembangan Teknologi yang belum merataar Digital Service	Penerapan Big Data & Dashboard layanan
Mengatasi Kesenjangan Digital	Ketimpangan akses internet antar wilayah	1. Kesetaraan akses layanan public 2. Pengurangan	Kesenjangan Akses Internet dalam Melaksanakan Pemerintahan Digital	Program Desa Digital & Literasi Digital Kominfo RI.	Kesenjangan digital antar wilayah (utara-selatan, kota-desa)	1. Pemerataan infrastruktur TIK 2. Pengembangan *Smart Village*/Desa Digital

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Diskominfo	Permasalahan	Isu klhs yang relevan dengan Diskominfo	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan pd			Isu strategis Diskominfo
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
		kesenjangan sosial				

Sumber : Dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bandung dan Sub Bagian Program Diskominfo

BAB III

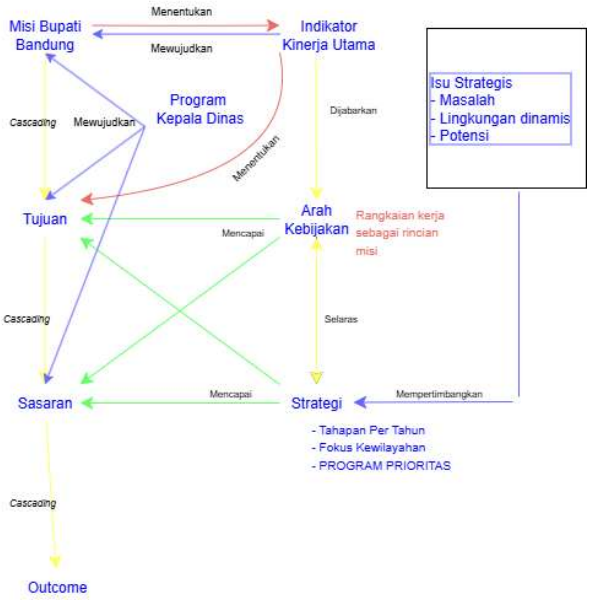
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Diskominfo Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Renstra Diskominfo Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun dengan dilengkapi arsitektur kinerja yang menggambarkan alur keterkaitan antara visi, misi, hingga program pembangunan yang dirancang. Tujuan dan sasaran dalam Renstra merupakan hasil dari proses perumusan capaian strategis Kabupaten Bandung, yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan perangkat daerah. Oleh karena itu, penentuan tujuan dan sasaran harus bersifat terukur (*measurable*), sehingga dapat dievaluasi secara objektif melalui indikator yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai terakhir renstra.
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi selama kurun waktu renstra.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Diskominfo



Sumber : Inmendagri 2 Tahun 2025 dan Sub Bag Program Diskominfo 2025

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa perencanaan dibuat sistematis dan terintegrasi dimulai dari misi kepala daerah hingga pencapaian *outcome*. Setiap elemen saling terkait dan memiliki fungsi spesifik dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

3.1.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapian Misi Bupati Bandung periode 2025-2029, Diskominfo merumuskan tujuan perangkat daerah yaitu “Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital yang didukung oleh data statistik yang akurat dan sistem keamanan informasi pemerintah daerah yang andal”. Tujuan ini akan membantu mewujudkan Misi Bupati 3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Parisipatif, Transparan dan Akuntabel.

Pada periode ini Bupati Bandung memiliki Visi “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkut, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Untuk mewujudkan Visi ini ada lima Misi Pembangunan. Untuk melihat kesinambungan antara visi misi dan tujuan PD dapat dilihat gambar berikut:

Gambar 3.2 Keterkaitan Renstra Diskominfo



Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung 2025 - 2029

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan daerah dalam bentuk yang lebih spesifik, terukur dan operasional. Untuk mencapai Tujuan Perangkat Daerah, berikut adalah sasaran Renstra Diskominfo.

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola statistik sektoral untuk mendukung pembangunan berbasis data melalui penguatan kelembagaan, SDM, infrastruktur, dan kualitas data statistik
3. Meningkatnya Keamanan Siber Lingkungan Pemerintah Daerah

Untuk lebih jelas melihat keterkaitan tujuan sasaran dan indikatornya, pada tabel berikut dapat dilihat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo.

Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital yang didukung oleh data statistik yang akurat dan sistem keamanan informasi pemerintah daerah yang andal		Indeks Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	75	77	78	79	80	81	Nilai yang menggambarkan tingkat transformasi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, dihitung berdasarkan skor capaian indikator-indikator komponen transformasi layanan publik sesuai metodologi yang ditetapkan pemerintah.
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,2	1,83	1,92	1,96	2,00	2,04	Nilai yang menunjukkan tingkat penerapan SPBE di instansi pemerintah, dihitung dari penilaian atas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE sesuai pedoman evaluasi SPBE.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Pembangunan Statistik	2,84	3,02	3,04	3,2	3,23	3,4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
			Indeks Keamanan Informasi	454	455	460	465	470	475	Nilai yang menunjukkan tingkat keamanan informasi di instansi pemerintah, dihitung dari hasil penilaian komponen tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko, dan pengendalian teknis sesuai standar yang berlaku.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Persentase Pengaduan dengan Status Selesai	80%	81%	82%	83%	84%	85%	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang berstatus selesai dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan yang diterima pada periode tertentu, dihitung dengan rumus: (Jumlah Pengaduan Selesai / Total Pengaduan) × 100%.
			Indeks Komunikasi dan Informatika	75	77	78	79	80	81	Nilai yang menggambarkan tingkat efektivitas komunikasi publik dan pengelolaan informatika di suatu daerah, dihitung berdasarkan penilaian capaian dimensi komunikasi, informasi, dan pemanfaatan teknologi sesuai instrumen yang berlaku.
			Indeks SPBE/Pemerintahan Digital	3,98	1,83	1,92	1,96	2,00	2,04	Nilai yang menunjukkan tingkat penerapan SPBE di instansi pemerintah, dihitung dari penilaian atas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE sesuai pedoman evaluasi SPBE.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola statistik sektoral untuk mendukung pembangunan berbasis data melalui penguatan kelembagaan, SDM, infrastruktur, dan kualitas data statistik	Indek Pembangunan Statistik (IPS)	2,84	3,02	3,04	3,2	3,23	3,4	Nilai indeks yang menggambarkan tingkat capaian pembangunan statistik di daerah sesuai indikator yang ditetapkan oleh BPS atau ketentuan perundangan.
		Meningkatnya Keamanan Siber Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi	454	455	460	465	470	475	Nilai capaian hasil pengukuran keamanan informasi berdasarkan parameter atau instrumen penilaian yang berlaku secara nasional.

Sumber : Sub Bagian Program Diskominfo

3.2 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis. Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfo Kabupaten Bandung selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo. Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Dalam memberikan arah pelaksanaan pembangunan yang sesuai kapasitas fiskal dan kesiapan kelembagaan maka pembangunan dibuat bertahap, pembagian urutan ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan strategis terukur setiap tahunnya, mempermudah pengendalian dan evaluasi capian kinerja setiap tahun, serta membat strategi pembangunan ini adaptif terhadap dinamuka dan tatangan pembangunan yang berkembang. Tahapan pembangunan renstra Diskominfo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Diskominfo

Tahap Pembangunan				
Tahap I (2025) Pemerataan Kualitas SDM dan Infrastruktur Dalam Menunjang Pelayanan Publik yang Optimal	Tahap II (2026) Peningkatan kepatuhan terhadap *standard* yang digunakan dalam SMKI	Tahap III (2027) Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan	Tahap IV (2028) Pemantapan Kualitas Layanna Publik	Tahap V (2029) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan
Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan tata kelola satu data melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan	Peningkatan infrastruktur keamanan Informasi Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya keamanan informasi dengan pendekatan	Penguatan kelembagaan dan regulasi serta keterbukaan informasi berdasarkan riset dan inovasi daerah	-Pengembangan infrastruktur TIK dan program digital literasi secara khusus ke wilayah 3T di Kabupaten Bandung, sebagai	Membangun atau mendukung platform digital (website, media *online*, aplikasi) yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan, saran, laporan isu-isu di wilayah mereka (misalnya melalui e-partisipasi, *e-loyality*, laporan pelanggaran/kerusakan

Tahap Pembangunan				
Tahap I (2025) Pemerataan Kualitas SDM dan Infrastruktur Dalam Menunjang Pelayanan Publik yang Optimal	Tahap II (2026) Peningkatan kepatuhan terhadap *standard* yang digunakan dalam SMKI	Tahap III (2027) Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan	Tahap IV (2028) Pemantapan Kualitas Layanna Publik	Tahap V (2029) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan
	standard ISO 27001:2022		bentuk konkret untuk meredam kesenjangan akses TIK yang menjadi penghalang kesejahteraan berkeadilan -Peningkatan Akses Informasi dan Layanan Pemerintah melalui Membangun Pemerintahan Terpadu (*One Stop Government*) dan Digitalisasi Informasi Publik	infrastruktur), dan mengikuti perkembangan proyek pemerintah. Ini memperkuat ikatan kepedulian dan keadilan dalam partisipasi public Membangun jaringan internet berkecepatan tinggi yang luas, terutama di area pedesaan atau daerah tertinggal, melalui program *Wi-Fi* Publik, jaringan nirkabel, atau kemitraan dengan penyedia layanan. Ini menjadi prasyarat utama untuk masyarakat mendapatkan manfaat TIK

Sumber : Sub Bagian Program Diskominfo

3.3 Penyajian Lokus Diskominfo

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sejumlah lokus strategis yang menjadi fokus intervensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lokus tersebut menggambarkan area sasaran, baik berupa komunitas, perangkat daerah, maupun sektor pelayanan publik, yang menjadi target utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang informatif, transparan, serta berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pertama, pada aspek kemitraan komunikasi, lokus kegiatan difokuskan kepada komunitas informasi masyarakat (KIM), yaitu komunitas yang aktif dalam mendiseminasikan informasi publik serta telah terdaftar di Dinas Kominfo. Peran KIM menjadi penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi yang benar, tepat, dan bermanfaat kepada masyarakat. Potensi yang terdapat pada KIM adalah banyaknya KIM yang sudah aktif membuat jejaring komunikasi di desa/kelurahan, dan juga semangat partisipasi masyarakat dalam menyebarkan informasi pembangunan.

Kedua, pada aspek penyediaan akses internet, lokus diarahkan kepada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang

memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mendukung kelancaran pelayanan publik, serta memperkuat integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Daerah. Potensi yang terdapat dari lokus ini yaitu jaringan infrastruktur TIK di wilayah strategis telah tersedia yang akan mendorong transformasi digital layanan publik.

Ketiga, pada aspek penyelenggaraan statistik sektoral, lokusnya berada pada lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dengan penekanan pada peningkatan persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah Satu Data Indonesia. Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi landasan penting dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Potensi dari Lokus ini yaitu ketersediaan data sektoral yang makin lengkap membuat peluang integrasi dengan sistem perencanaan pembangunan, serta mendorong SDM statistik agar dimunculkan di tiap perangkat daerah.

Keempat, pada aspek penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, lokus kegiatan difokuskan kepada Perangkat Daerah yang telah dan akan menerapkan sistem elektronik dengan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Penerapan prinsip keamanan informasi ini merupakan bagian penting dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintah daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan berbasis digital. Potensi dari lokus ini antara lain adanya infrastruktur aplikasi yang sudah berjalan sehingga dapat menjadi pilot project penerapan keamanan informasi, meningkatnya kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya perlindungan data, serta dukungan regulasi nasional yang memperkuat penerapan SMKI. Penyajian Lokus Diskominfo lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Penyajian Lokus Diskominfo

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.164.624.214	3.159.922.818	3.159.922.818	3.159.922.818	3.159.922.818	Kemitraan Komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat. komunitas yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
2	Program Aplikasi Informatika	11.258.894.663	11.568.254.292	13.568.254.292	13.568.254.292	13.568.254.292	Penyediaan akses internet. Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	1.225.766.459	1.282.787.000	1.282.787.000	1.282.787.000	1.282.787.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaedah satu data
5	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	1.225.766.459	1.282.787.000	1.282.787.000	1.282.787.000	1.282.787.000	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaedah satu data
6	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	1.874.450.500	1.438.366.000	1.438.366.000.	1.438.366.000	1.438.366.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Elektronik dengan prinsip sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkup pemerintah daerah ada pada pemerintah daerah

Sumber : Sub Bagian Program Diskominfo

Dengan demikian, lokus-lokus pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana teknologi, tetapi juga pada penguatan ekosistem informasi, perlindungan data dan informasi, serta kolaborasi dengan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

3.4 Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Taun 2025-2029

Arah kebijakan adalah pedoman atau garis besar yang memandu rumusan strategi dan kebijakan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, baik dalam jangka waktu tertentu maupun secara

berkelanjutan. Arah kebijakan berfungsi sebagai landasan untuk mengarahkan implementasi dan pelaksanaan pembangunan agar lebih terstruktur dan efektif. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta potensi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berkeadilan, arah kebijakan Diskominfo Kabupaten Bandung pada umumnya akan difokuskan pada beberapa pilar utama:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Diskominfo

No	Operasionalisasi NSPK	Arah kebijakan rpjmd	Arah kebijakan pd	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan tata kelola satu data melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatkan implementasi e-Government dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi antar perangkat daerah. 2. Mendorong pemanfaatan aplikasi layanan publik digital berbasis data untuk efisiensi dan transparansi. 3. Penguatan arsitektur TIK, data center lokal, jaringan intra pemerintah (intranet), dan keamanan informasi.
2		Peningkatan infrastruktur IT untuk layanan pemerintahan dengan skema pembiayaan yang inovatif	Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	1. Optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pelaksana di setiap OPD. 2. Penyediaan informasi publik yang proaktif dan berkala melalui portal resmi, media sosial, serta radio daerah (Radio Kandaga) 3. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sesuai Standar Layanan KIP - Penyusunan Perbup tentang Pengelolaan Informasi Publik
3		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan tata kelola satu data (big data) melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan	Diseminasi Informasi Pembangunan dan Citra Pemerintah	1. Memperluas kanal komunikasi publik berbasis multimedia dan bahasa yang mudah diakses masyarakat. 2. Meningkatkan kolaborasi dengan media massa dan komunitas informasi lokal. 3. Membangun komunikasi dua arah melalui media sosial resmi Pemda dan sistem aduan publik.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah kebijakan rpjmd	Arah kebijakan pd	Ket
4		Peningkatan infrastruktur IT untuk layanan pemerintahan dengan skema pembiayaan yang inovatif	Pemanfaatan Data dan Statistik Daerah	1. Penguatan Satu Data Kabupaten Bandung melalui pembinaan statistik sektoral OPD. 2. Pemutakhiran data sektoral untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). 3. Interoperabilitas data antar sistem informasi daerah.
5		Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital	Peningkatan Partisipasi dan Literasi Digital Masyarakat	1. Sosialisasi literasi digital dan keamanan siber kepada masyarakat umum, pelajar, dan ASN. 2. Fasilitasi kanal SP4N-LAPOR!, layanan call center, dan media aduan digital untuk menerima aspirasi warga. 3. Pembinaan komunitas informasi masyarakat (KIM) di desa/kelurahan untuk memperkuat partisipasi publik dalam diseminasi informasi
6		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan tata kelola satu data (big data) melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan	Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian	1. Implementasi kebijakan keamanan siber dan manajemen risiko informasi berbasis ISO 27001. 2. Pengelolaan sistem persandian dan pengamanan data strategis pemerintah daerah. 3. Audit sistem informasi secara berkala serta penerapan kontrol akses di lingkungan TIK.
7		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan tata kelola satu data (big data) melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan	Kolaborasi dan Integrasi Lintas Sektor	1. Sinergi antara Diskominfo dengan Bapperida, Inspektorat, DPMPTSP, dan OPD lainnya dalam integrasi sistem informasi dan tata kelola data 2. Dukungan terhadap program prioritas daerah: digitalisasi PAD, SPBE, smart city, dan keterbukaan informasi publik.

Sumber : Sub Bagian Program Diskominfo

1. Membangun Infrastruktur Komunikasi dan Informatika yang Luas dan Terpadu:

- Fokus: Menjamin akses jaringan komunikasi (terutama internet berkecepatan tinggi) yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, termasuk area desa dan terpencil (3T).
- Kebijakan: Mendorong pengembangan jaringan nirkabel (*Wi-Fi* publik, BTS), kabel serat optik, dan potensi teknologi baru. Meningkatkan kapasitas dan ketahanan jaringan. Membangun pusat data atau pusat kernet yang efisien.

2. Mendorong Pemanfaatan TIK untuk Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntable:
   - Fokus: Menggunakan TIK sebagai sarana utama untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi internal pemerintahan.
   - Kebijakan: Pengembangan dan peningkatan sistem e-pemerintahan (e-dokumen, e-perizinan, e-pengaduan masyarakat, e-keuangan). Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pelayanan terpadu. Promosi open data untuk meningkatkan transparansi. Penguatan keamanan informasi dan data pribadi.
3. Meningkatkan Literasi TIK dan Akses bagi Masyarakat:
   - Fokus: Memastikan masyarakat Kabupaten Bandung, terutama kelompok rentan dan di area 3T, memiliki keterampilan dan akses untuk menggunakan TIK.
   - Kebijakan: Pelaksanaan program digital literacy secara massal dan tersegmentasi. Penguatan pos informasi desa (PID) atau pusat layanan TIK komunitas. Penyediaan aksesibilitas teknologi yang ramah bagi penyandang disabilitas (difabel). Mendukung program pengembangan talenta digital lokal.
4. Mendorong Inovasi dan Ekonomi Digital Lokal:
   - Fokus: Menggunakan TIK sebagai penggerak inovasi dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
   - Kebijakan: Membangun ekosistem inovasi digital (misalnya melalui penghargaan inovasi, kemitraan dengan startup/lembaga pendidikan). Mendorong penggunaan platform e-commerce, e-pembayaran, dan layanan digital lainnya oleh masyarakat dan UMKM. Promosi penggunaan TIK dalam pertanian, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya.
5. Mengatasi Kesenjangan Digital dan Promosi Akses Ramah Lingkungan:
   - Fokus: Memastikan pertumbuhan TIK berjalan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- Kebijakan: Menerapkan kebijakan khusus untuk mengaksesi area 3T. Mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam infrastruktur TIK. Mengembangkan strategi pengelolaan e-waste yang baik dan berkelanjutan.

6. Menjaga Keamanan Informasi dan Infrastruktur Kritis:
   - Fokus: Menjamin keandalan dan keamanan sistem informasi dan infrastruktur TIK.
   - Kebijakan: Pengembangan strategi dan infrastruktur keamanan siber yang komprehensif. Penguatan kapasitas penyuluhan dan penanggulangan serangan siber. Pemanfaatan teknologi canggih untuk monitoring dan perlindungan data.

Arah kebijakan ini tidak boleh bersifat statis, melainkan harus selalu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, arahan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta hasil evaluasi kinerja sendiri. Semua arah kebijakan ini harus diarahkan untuk mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Urusan Statistik di Diskominfo Kabupaten Bandung, meskipun seringkali tidak menjadi fokus utama dibandingkan TIK, memiliki arah kebijakan yang krusial untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik dan pembangunan yang berbasis data. Arah kebijakan utamanya meliputi:

1. Penyediaan Data Statistik yang Akurat, Terpadu, dan Terkini:
   - Fokus: Memastikan data statistik yang dibutuhkan pemerintah Kabupaten Bandung dan masyarakat tersedia, akurat, dan relevan.
   - Kebijakan: Mendorong sinkronisasi data antar satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) melalui sistem informasi terpadu. Meningkatkan kapasitas pengumpulan data melalui metode digital (sensus online, survei online). Melaksanakan verifikasi dan validasi data secara rutin. Memastikan data disajikan dalam format yang mudah dipahami.
2. Pengembangan Sistem Informasi Statistik yang Terpadu dan Berbasis TIK:
   - Fokus: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas penyediaan data statistik.
   - Kebijakan: Pengembangan atau penguatan pusat data statistik (data warehouse) yang terintegrasi. Implementasi sistem manajemen

statistik yang mendukung proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpanan data. Menerapkan standar data yang konsisten.

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Transparansi Data Statistik:
   - Fokus: Memudahkan akses masyarakat dan pihak ketiga terhadap data statistik publik.
   - Kebijakan: Penerapan prinsip Open Data untuk data statistik non-rahasia negara. Publikasi data statistik melalui portal data terbuka Kabupaten Bandung atau portal resmi Diskominfo dalam format yang ramah pengguna dan mudah digunakan (misalnya, API, CSV, Excel). Pemberian klarifikasi mengenai definisi, metode pengumpulan, dan batasan penggunaan data.
4. Penguatan Kapasitas Analisis Data dan Pemberian Biodata:
   - Fokus: Menghasilkan informasi berharga dari data statistik yang tidak hanya berupa angka mentah.
   - Kebijakan: Meningkatkan keterampilan analis data di Dinas (atau melibatkan mitra ahli jika diperlukan). Pengembangan kapasitas untuk melakukan analisis data yang mendalam dan menyajikan biodata (ringkasan data yang diberi konteks dan interpretasi) yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dan masyarakat.
5. Pengawasan Kualitas dan Keandalan Data Statistik:
   - Fokus: Menjamin kepercayaan terhadap data statistik yang dipublikasikan.
   - Kebijakan: Menerapkan pedoman dan standar internasional atau nasional terkait metodologi pengumpulan dan penyajian data statistik. Melakukan audit data secara berkala. Memfasilitasi mekanisme verifikasi dan penyelesaian keluhan terkait data statistik.
6. Kolaborasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait:
   - Fokus: Mencegah duplikasi pengumpulan data dan memastikan data yang dikeluarkan koheren.
   - Kebijakan: Memelihara komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta dengan SKPD lain yang memiliki peran dalam pengumpulan data statistik dan data spasial. Menjalin kerjasama dalam hal penyaluran data dan standar data.

Arah kebijakan ini bertujuan agar urusan statistik di Diskominfo tidak hanya sebagai tugas administratif, tetapi menjadi pusat keunggulan dalam penyediaan data dan informasi berbasis data yang mendukung visi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM, KEGATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung serta mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung diperlukan penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang sistematis dan terintegrasi. Program ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan tantangan yang ada. Program-program yang dirancang harus mampu melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan usursan Persandian. Selain itu, setiap program juga perlu disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya yang tersedia, serta dapat diukur capaian dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Indikasi program yang disusun diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, setiap program Perangkat Daerah harus dirancang secara terukur melalui penetapan indikator, target, dan pagu indikatif. Ketiga elemen ini menjadi komponen utama dalam memastikan program yang dilaksanakan benar-benar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Indikator program digunakan sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Indikator tersebut disusun secara kuantitatif maupun kualitatif, agar mampu menggambarkan capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program secara objektif. Dengan adanya indikator yang jelas, evaluasi terhadap keberhasilan program dapat dilakukan secara berkala dan sistematis. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Diskominfo Tahun 2025 – 2029

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital yang didukung oleh data statistik yang akurat dan sistem keamanan informasi pemerinta				Indeks Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital		Nilai yang menggambarkan tingkat transformasi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, dihitung berdasarkan skor capaian indikator-indikator komponen transformasi layanan publik sesuai metodologi yang ditetapkan pemerintah.
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai yang menunjukkan tingkat penerapan SPBE di instansi pemerintah, dihitung dari penilaian atas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE sesuai pedoman evaluasi SPBE.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	h daerah yang andal				Indeks Pembangunan Statistik		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
					Indeks Keamanan Informasi		Nilai yang menunjukkan tingkat keamanan informasi di instansi pemerintah, dihitung dari hasil penilaian komponen tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko, dan pengendalian teknis sesuai standar yang berlaku.
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital			Persentase Pengaduan dengan Status Selesai		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang berstatus selesai dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan yang diterima pada periode tertentu, dihitung dengan rumus: (Jumlah Pengaduan Selesai / Total Pengaduan) × 100%.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Indeks Komunikasi dan Informatika		Nilai yang menggambarkan tingkat efektivitas komunikasi publik dan pengelolaan informatika di suatu daerah, dihitung berdasarkan penilaian capaian dimensi komunikasi, informasi, dan pemanfaatan teknologi sesuai instrumen yang berlaku.
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai yang menunjukkan tingkat penerapan SPBE di instansi pemerintah, dihitung dari penilaian atas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE sesuai pedoman evaluasi SPBE.
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai capaian kinerja reformasi birokrasi perangkat daerah yang dihitung sesuai pedoman Kementerian PAN-RB.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah		Nilai capaian penerapan manajemen risiko perangkat daerah berdasarkan instrumen penilaian yang berlaku.
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB.
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja, renstra, atau perencanaan lain yang disusun oleh perangkat daerah sesuai ketentuan.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang telah disusun dan disertai laporan hasil koordinasi penyusunannya.
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang telah ditetapkan beserta laporan hasil koordinasi penyusunan perubahannya.
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD yang telah ditetapkan dan laporan hasil koordinasi penyusunannya.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang telah disahkan beserta laporan hasil koordinasi penyusunan perubahannya.
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD beserta ikhtisar realisasi kinerja, dilengkapi dengan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen tersebut.
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja yang disusun oleh perangkat daerah dalam periode tertentu.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen resmi hasil pelaksanaan fungsi walidata pendukung statistik sektoral daerah yang memuat verifikasi, validasi, dan penyajian data.
				Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang berhasil dihimpun dan telah melalui proses pemeriksaan kualitas di lingkup perangkat daerah.
				Terlaksananya Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah berita acara hasil rapat forum perangkat daerah sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangannya, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah dokumen perencanaan urusan pemerintahan selain Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD yang berhasil disusun oleh perangkat daerah.
				Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah materi atau topik pembahasan yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan perangkat daerah.
				Terlaksananya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah berita acara resmi yang dihasilkan dari kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan/program antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan yang diselesaikan dan disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dibandingkan dengan jumlah total dokumen administrasi keuangan yang wajib disusun. Rumus: (Jumlah dokumen tepat waktu ÷ Jumlah total dokumen) × 100%.
				Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan yang diselesaikan dan disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dibandingkan dengan jumlah total dokumen administrasi keuangan yang wajib disusun. Rumus: (Jumlah dokumen tepat waktu ÷ Jumlah total dokumen) × 100%.
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen resmi yang dihasilkan dalam rangka penyediaan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur sipil negara.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang memuat proses pencatatan, pengelolaan, dan verifikasi transaksi keuangan pada SKPD sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan.
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan tahunan SKPD yang telah disusun dan dilengkapi dengan berita acara atau laporan hasil koordinasi penyusunan antar pihak terkait.
				Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen yang berisi tanggapan resmi terhadap temuan pemeriksaan serta rencana atau bukti tindak lanjut yang dilakukan.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan berkala (bulanan, triwulanan, semesteran) yang disusun oleh SKPD beserta dokumen koordinasi penyusunannya.
				Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang memuat analisis proyeksi realisasi anggaran dibandingkan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perbandingan antara jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan dengan total dokumen administrasi kepegawaian, dikalikan 100%.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Banyaknya unit atau kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan, perbaikan, atau peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kedisiplinan pegawai.
				Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Total paket pakaian dinas beserta atribut resmi yang disediakan/disalurkan kepada pegawai sesuai ketentuan.
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen yang memuat data hasil pendataan, pengolahan, dan pemutakhiran informasi kepegawaian.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen yang berisi hasil koordinasi dan pelaksanaan terkait pengelolaan serta operasional sistem informasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen yang memuat hasil kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai sesuai periode penilaian yang berlaku.
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Banyaknya pegawai yang telah mencapai usia pensiun dan resmi dipulangkan/diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah laporan resmi yang dibuat terkait pemulangan pegawai yang meninggal dunia saat menjalankan tugas kedinasan.
				Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	Total Aparatur Sipil Negara yang mengalami mutasi atau perpindahan tugas ke unit kerja lain sesuai surat keputusan yang berlaku.
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banyaknya pegawai yang mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Banyaknya peserta yang hadir dan terdaftar dalam kegiatan sosialisasi yang membahas materi peraturan perundang-undangan tertentu.
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Total peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang membahas penerapan atau implementasi peraturan perundang-undangan.
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perbandingan antara jumlah dokumen pelayanan administrasi umum yang berhasil dipenuhi terhadap total dokumen yang direncanakan, dinyatakan dalam persen.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banyaknya paket komponen kelistrikan dan penerangan yang disiapkan untuk menunjang operasional kantor perangkat daerah.
				Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Total paket berisi peralatan dan perlengkapan kantor (furnitur, alat tulis, mesin kantor, dll.) yang disediakan dalam periode tertentu.
				Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banyaknya paket berisi bahan logistik (misalnya ATK, kebutuhan operasional harian) yang disiapkan dan didistribusikan untuk mendukung kegiatan perangkat daerah.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Total paket berisi hasil cetakan atau penggandaan dokumen, formulir, buku, atau materi lainnya yang disediakan untuk mendukung kegiatan perangkat daerah.
				Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen berbentuk buku, publikasi, atau naskah peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dapat diakses oleh perangkat daerah.
				Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Banyaknya paket bahan atau material (selain logistik umum) yang disediakan untuk pelaksanaan program atau kegiatan perangkat daerah.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Total laporan yang dihasilkan dari kegiatan fasilitasi kunjungan tamu, baik kunjungan kerja, studi banding, atau kunjungan resmi lainnya, yang memuat rincian kegiatan dan hasilnya.
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Total laporan yang dihasilkan dari kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi antar SKPD, berisi agenda, peserta, pembahasan, dan tindak lanjut.
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Banyaknya dokumen yang memuat pencatatan, pengelolaan, dan pemeliharaan arsip dinamis (arsip yang masih digunakan) di SKPD.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Total dokumen yang berisi data, panduan, atau bukti dukungan untuk pelaksanaan SPBE di SKPD, misalnya SOP, panduan teknis, atau laporan implementasi.
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perbandingan antara jumlah dokumen pelayanan pengadaan barang milik daerah yang telah diproses sesuai prosedur dengan total dokumen pengadaan yang direncanakan, dinyatakan dalam persentase.
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banyaknya unit kendaraan dinas (perorangan atau jabatan) yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat/pegawai pemerintah daerah.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya unit kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional atau kegiatan lapangan pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
				Terlaksananya Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	Total unit alat berat (misalnya excavator, bulldozer, crane) yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah.
				Terlaksananya Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Banyaknya unit alat angkut darat tanpa mesin (misalnya gerobak, sepeda) yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah paket furnitur (meja, kursi, lemari, rak, dll.) yang disediakan sesuai kebutuhan SKPD.
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Total unit peralatan dan mesin di luar kategori yang telah disebutkan (alat berat, kendaraan, mebel) yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
				Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Total unit aset tetap selain tanah, bangunan, kendaraan, mebel, dan mesin yang disediakan untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Banyaknya aset tak berwujud (misalnya perangkat lunak, hak cipta, paten, lisensi) yang dimiliki atau disediakan untuk mendukung operasional.
				Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung atau bangunan milik pemerintah daerah yang digunakan untuk perkantoran atau fungsi lain sesuai tugas dan fungsi SKPD.
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banyaknya sarana dan prasarana utama yang melekat pada gedung/bangunan (misalnya AC, lift, sistem listrik) yang disediakan.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana tambahan di luar sarana utama (misalnya tempat parkir, taman, ruang tunggu) yang disediakan untuk mendukung fungsi gedung/bangunan.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perbandingan antara jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah disusun dengan jumlah laporan yang direncanakan, dinyatakan dalam persen.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya dokumen laporan yang memuat informasi tentang kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat untuk mendukung operasional SKPD.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Total laporan yang menyajikan informasi tentang penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik untuk kebutuhan perangkat daerah.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan yang berisi informasi tentang penyediaan jasa terkait peralatan dan perlengkapan kantor bagi SKPD.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banyaknya laporan yang mencatat penyediaan jasa pelayanan umum kantor seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang masih berfungsi optimal dan layak digunakan dibandingkan dengan total BMD yang dimiliki.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Total unit kendaraan dinas perorangan/jabatan yang telah mendapatkan perawatan berkala serta pembayaran pajak tahunan.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang dilakukan pemeliharaan dan pelunasan kewajiban pajak serta perizinan resmi.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah unit alat berat (misalnya excavator, bulldozer) yang dilakukan perawatan serta pembayaran biaya perizinan penggunaannya.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Banyaknya unit alat angkut darat tak bermotor (misalnya gerobak, trolley) yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran perizinan bila berlaku.
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Total unit perabot kantor (kursi, meja, lemari, dan sejenisnya) yang telah dilakukan perawatan agar tetap berfungsi dan layak pakai.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin (selain kendaraan atau alat berat) yang mendapatkan perawatan rutin untuk menjaga fungsinya.
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Total aset tetap selain yang masuk kategori kendaraan, bangunan, mebel, peralatan, atau mesin, yang dilakukan pemeliharaan rutin.
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Banyaknya aset tak berwujud (misalnya perangkat lunak, lisensi, hak cipta) yang dilakukan perpanjangan, pembaruan, atau perawatan sistemnya.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung atau bangunan milik pemerintah daerah yang dilakukan kegiatan perawatan, perbaikan, atau rehabilitasi agar tetap layak fungsi.
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Total unit sarana (misalnya AC, lift, instalasi listrik) dan prasarana (misalnya sistem air bersih, drainase) yang terdapat pada gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan perawatan atau perbaikan.
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitas pendukung di luar bangunan utama (misalnya area parkir, taman, pagar, pos keamanan) yang dilakukan pemeliharaan atau rehabilitasi.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas (dalam meter persegi) tanah milik pemerintah daerah yang dilakukan penataan, pembersihan, atau perbaikan kualitas fisik untuk mendukung fungsi penggunaannya.
			Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase jumlah masyarakat sasaran yang memahami kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dibandingkan total masyarakat sasaran, dihitung dengan rumus: (Jumlah masyarakat sasaran yang mengetahui / Total masyarakat sasaran) × 100%.
				Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah komunitas/mitra strategis yang aktif menyebarkan informasi dibandingkan total komunitas/mitra strategis yang ada, dihitung dengan rumus: (Jumlah komunitas/mitra strategis yang menyebarkan informasi / Total komunitas/mitra strategis) × 100%.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					pemerintah kabupaten/ kota		
					Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		Persentase jumlah konten informasi yang sesuai dengan STRAKOM dibandingkan total konten informasi yang diproduksi, dihitung dengan rumus: (Jumlah konten sesuai STRAKOM / Total konten informasi) × 100%.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		Persentase kegiatan diseminasi dan layanan informasi publik yang sesuai STRAKOM dan SOP dibandingkan total kegiatan diseminasi dan layanan informasi publik, dihitung dengan rumus: (Jumlah kegiatan sesuai STRAKOM dan SOP / Total kegiatan diseminasi dan layanan informasi publik) × 100%.
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Relasi Media	Jumlah kegiatan relasi media yang dilakukan kepada media yang memenuhi ketiga kriteria yang telah ditentukan, dihitung berdasarkan data kegiatan selama periode tertentu.
				Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang terdaftar di Dinas Kominfo dan memiliki aktivitas penyebaran informasi secara rutin sesuai periode pengukuran.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang telah diproses dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan terkait isu publik yang berkembang serta usulan agenda komunikasi prioritas yang disampaikan kepada pimpinan daerah.
				Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi	Persentase jumlah orang atau kelompok masyarakat yang menerima/mengakses informasi publik dibandingkan dengan total khalayak sasaran, dihitung dengan rumus: (Jumlah khalayak terpapar / Total khalayak sasaran) × 100%.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik Pemda yang aktif dikelola, termasuk media berbayar yang digunakan sesuai kriteria atau juknis yang berlaku.
				Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah dokumen strategi komunikasi publik yang dirancang dan disahkan dalam periode tertentu.
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten	Jumlah materi informasi publik yang diproduksi dan/atau dipublikasikan dalam periode tertentu, baik dalam bentuk teks, audio, visual, maupun multimedia.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN yang bertugas di bidang komunikasi publik dan mendapatkan fasilitasi untuk mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan dalam periode tertentu.
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		1 Persentase Perangkat Daerah yang mendapat layanan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menerima layanan pengelolaan nama domain/subdomain Pemda dan domain pemerintah desa dibandingkan total perangkat daerah, dihitung dengan rumus: (Jumlah perangkat daerah yang mendapat layanan / Total perangkat daerah) × 100%.
					2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Persentase OPD yang menggunakan akses internet dari Dinas Kominfo dibandingkan total OPD, dihitung dengan rumus: (Jumlah OPD yang terhubung / Total OPD) × 100%.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan seeara online dan terintegrasi		Persentase layanan publik yang tersedia secara online dan terhubung ke sistem terintegrasi dibandingkan total layanan publik, dihitung dengan rumus: (Jumlah layanan publik online dan terintegrasi / Total layanan publik) × 100%.
				Meningkatnya jumlah penggunaan domain/subdomain resmi pemerintah	Persentase perangkat daerah dan desa yang telah menggunakan domain/subdomain resmi	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah dan desa yang menggunakan domain atau subdomain resmi pemerintah dibandingkan total perangkat daerah dan desa, dihitung dengan rumus: (Jumlah perangkat daerah dan desa yang menggunakan domain resmi / Total perangkat daerah dan desa) × 100%.
				Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah dokumen administrasi yang terkait dengan pengelolaan nama domain/subdomain Pemda dan domain pemerintah desa yang disusun dan disahkan dalam periode tertentu.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkelolanya E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Jumlah Aplikasi penunjang e-government terbangun dan terpelihara	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dibuat untuk mendukung penyelenggaraan e-government dan dalam kondisi berfungsi serta mendapatkan pemeliharaan rutin.
					2 Jumlah aplikasi/aplikasi berbasis web yang aktif digunakan oleh perangkat daerah		Jumlah aplikasi, termasuk aplikasi berbasis web, yang digunakan secara aktif oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
				Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah aplikasi SPBE milik pemerintah daerah yang telah diunggah, ditempatkan, dan beroperasi di Pusat Data Nasional sesuai ketentuan.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah dokumen yang dihasilkan sebagai bukti kegiatan koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE, seperti notulen rapat, laporan, atau berita acara.
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang sudah memiliki koneksi ke jaringan intra pemerintah daerah kabupaten/kota.
				Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah layanan yang disediakan pemerintah daerah yang diakses atau dijalankan melalui portal terintegrasi sesuai ketentuan.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen yang dihasilkan sebagai bukti fasilitasi kegiatan audit teknologi informasi dan komunikasi oleh Dinas Kominfo.
				Terlaksananya Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibuat atau dikembangkan mengikuti regulasi terkait standar teknis dan prosedur SPBE.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan yang memuat hasil kegiatan operasional pusat kendali (command center) dalam periode tertentu.
				Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah aplikasi SPBE pemerintah daerah yang telah terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah sesuai ketentuan.
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen laporan yang dihasilkan dari kegiatan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE oleh Dinas Kominfo.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet	Jumlah unit kerja perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah yang menggunakan layanan internet dari Dinas Kominfo.
				Terlaksananya Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen resmi kebijakan tata kelola SPBE yang mencakup arsitektur SPBE, peta rencana, proses bisnis, serta rencana dan anggaran SPBE.
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang mendukung implementasi program Kabupaten/Kota Cerdas.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola statistik sektoral untuk mendukung pembangunan berbasis data melalui penguatan kelembagaan, SDM, infrastruktur, dan kualitas data statistik			Indeks Pembangunan Statistik		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tercapainya kolaborasi dan integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah ÷ Jumlah seluruh OPD) × 100%.
					Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah ÷ Jumlah seluruh OPD) × 100%.
				Tercapainya kolaborasi dan integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaedah satu data	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah data statistik sektoral yang memenuhi kaedah satu data ÷ Jumlah seluruh data statistik sektoral) × 100%.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	(Jumlah kegiatan statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari pembina data statistik ÷ Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral) × 100%.
				Terlaksananya Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	(Jumlah kegiatan statistik sektoral yang memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi/data induk ÷ Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral) × 100%.
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	(Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses publik ÷ Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral) × 100%.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah total pegawai yang mengikuti pelatihan di bidang statistik pada periode tertentu.
				Terlaksananya Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	(Jumlah kegiatan statistik sektoral yang memiliki dokumen perencanaan ÷ Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral) × 100%.
				Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah dokumen laporan resmi hasil penyelenggaraan forum satu data daerah pada periode tertentu.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Keamanan Siber Lingkungan Pemerintah Daerah			Indeks Keamanan Informasi		Nilai capaian hasil pengukuran keamanan informasi berdasarkan parameter atau instrumen penilaian yang berlaku secara nasional.
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase Penurunan Serangan Cyber	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	((Jumlah serangan cyber tahun sebelumnya – Jumlah serangan cyber tahun berjalan) ÷ Jumlah serangan cyber tahun sebelumnya) × 100%.
				Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Elektronik dengan prinsip sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkup pemerintah daerah ada pada pemerintah daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah mengimplementasikan sistem elektronik sesuai prinsip SMKI di lingkungan pemerintah daerah.

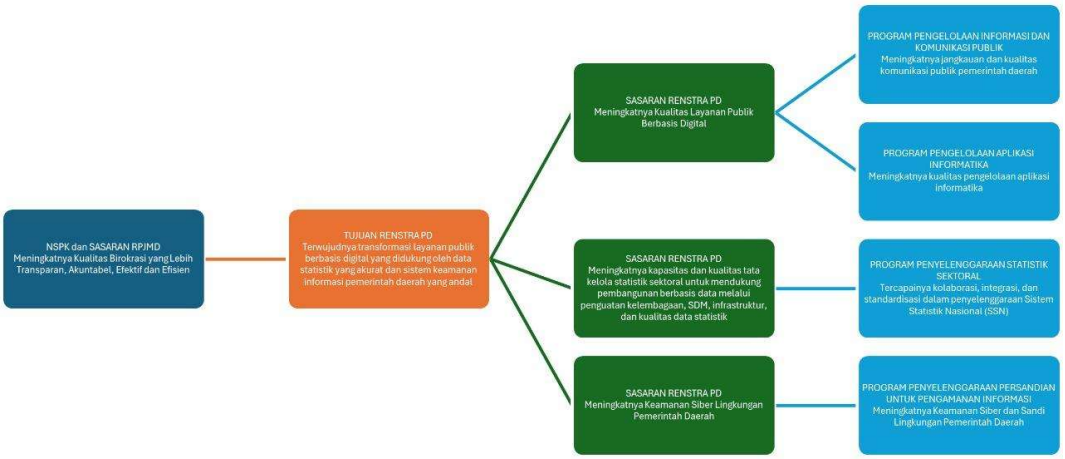
Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Pengujian keamanan sistem elektronik (Pentest)		Jumlah kegiatan pengujian keamanan terhadap sistem elektronik untuk menemukan dan menutup kerentanan keamanan.
				Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah dokumen laporan resmi terkait pelaksanaan keamanan informasi, baik pada sistem elektronik maupun non-elektronik.
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang memanfaatkan layanan keamanan informasi yang disediakan pemerintah daerah.

Nspk dan sasaran rpjmd yang relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan resmi terkait tata kelola keamanan informasi dan persandian yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, atau Norma/Standar/Prosedur/Kriteria sebagai panduan pelaksanaan persandian.

Sumber : Sub Bagian Program Diskominfo Tahun 2025

Diskominfo merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan renstra berdasarkan Inmendagri 2 tahun 2025. Untuk lebih jelasnya, kerangka perumusan dapat dilihat pada gambar berikut :

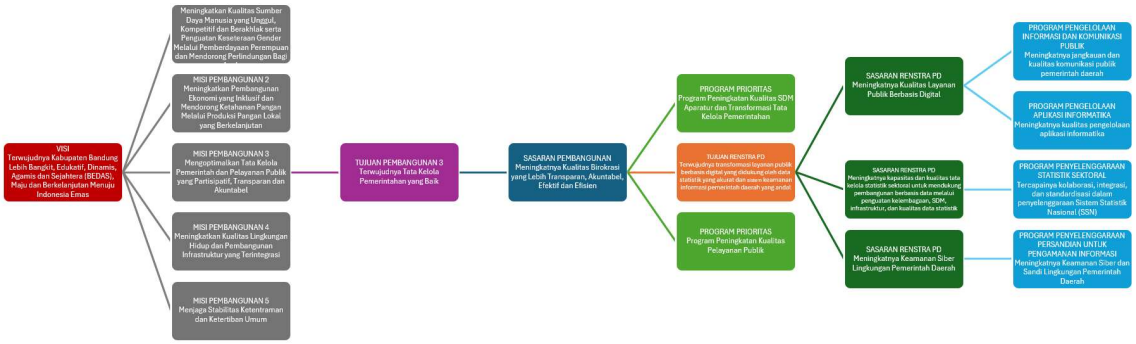
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ SubkegiatanRenstra PD (berdasarkan inmendagri 2 tahun 2025



Sumber : Dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bandung

Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan yan telah dirumuskan juga telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung. Keselarasan renstra Diskominfo dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2 Keselarasan Renstra PD dengan RPJMD 2025-2029



Sumber : Dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bandung

Secara detail, program, kegiatan, subkegiatan, target berserta pagu indikatif dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Diskominfo Kabupaten Bandung

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				33.873.682.350		33.825.348.000		35.825.348.000		35.825.348.000		35.825.348.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				29.325.348.000		29.325.348.000		29.325.348.000		29.325.348.000		29.325.348.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				30.773.465.391		31.104.195.000		31.104.195.000		31.104.195.000		31.104.195.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81,59	82,09	16.349.946.514	82,34	16.376.017.890	82,59	16.376.017.890	82,84	16.376.017.890	82,84	16.376.017.890	S.3.1
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	46,14	46,16		46,17		46,18		46,19		46,20		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80,05	80,10	100.854.600	80,40	106.539.000	80,60	106.539.000	80,80	106.539.000	81,00	106.539.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	9.675.000	2 Dokumen	11.319.000	2 Dokumen	11.319.000	2 Dokumen	11.319.000	2 Dokumen	11.319.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	5.240.000	3 Dokumen	3.250.000	3 Dokumen	3.250.000	3 Dokumen	3.250.000	3 Dokumen	3.250.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	6.680.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	4.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	6.680.000	0 Laporan	6.680.000	0 Laporan	6.680.000	0 Laporan	6.680.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3 Laporan	6.219.600	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	2.000.000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	73.040.000	1 Dokumen	73.040.000	1 Dokumen	73.040.000	1 Dokumen	73.040.000	1 Dokumen	73.040.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	69 Data	-	69 Data	-	69 Data	-	69 Data	-	69 Data	-	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3.250.000	1 Dokumen	3.250.000	1 Dokumen	3.250.000	1 Dokumen	3.250.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun												
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu												

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	13.113.530.800	100 Persen	13.114.772.000	100 Persen	13.114.772.000	100 Persen	13.114.772.000	100 Persen	13.114.772.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	54 Orang/bulan	13.087.022.000	54 Orang/bulan	13.087.022.000	54 Orang/bulan	13.087.022.000	54 Orang/bulan	13.087.022.000	54 Orang/bulan	13.087.022.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.935.000	1 Dokumen	6.250.000	1 Dokumen	6.250.000	1 Dokumen	6.250.000	1 Dokumen	6.250.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.273.800	1 Laporan	10.750.000	1 Laporan	10.750.000	1 Laporan	10.750.000	1 Laporan	10.750.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0 Laporan	1 Laporan	10.300.000	1 Laporan	10.750.000	1 Laporan	10.750.000	1 Laporan	10.750.000	1 Laporan	10.750.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	81.960.000	100 Persen	99.900.000	100 Persen	99.900.000	100 Persen	99.900.000	100 Persen	99.900.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai												
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian												

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	17.940.000,00	1 Dokumen	17.940.000,00	1 Dokumen	17.940.000,00	1 Dokumen	17.940.000,00	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan												
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas												
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan												
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49 Orang	54 Orang	11.960.000	54 Orang	11.960.000	54 Orang	11.960.000	54 Orang	11.960.000	54 Orang	11.960.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49 Orang	54 Orang	50.000.000	54 Orang	50.000.000	54 Orang	50.000.000	54 Orang	50.000.000	54 Orang	50.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 Persen	100 Persen	170.070.800	100 Persen	179.500.000	100 Persen	179.500.000	100 Persen	179.500.000	100 Persen	179.500.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.774.800	10 Paket	10.000.000	10 Paket	10.000.000	10 Paket	10.000.000	10 Paket	10.000.000	
Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.738.200	5 Paket	10.000.000	5 Paket	10.000.000	5 Paket	10.000.000	5 Paket	10.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.937.800	3 Paket	10.000.000	3 Paket	10.000.000	3 Paket	10.000.000	3 Paket	10.000.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.250.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	19.370.000	2 Laporan	19.500.000	2 Laporan	19.500.000	2 Laporan	19.500.000	2 Laporan	19.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100%	100%	236.913.600	100%	311.000.000	100%	311.000.000	100%	311.000.000	100%	311.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	3 Unit	105.000.000	3 Unit	111.000.000	3 Unit	111.000.000	3 Unit	111.000.000	3 Unit	111.000.000	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan												
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan												
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	10 Unit	94.413.600	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	10 Unit	37.500.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan												

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan												
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	2.297.327.917	100 Persen	2.168.269.890	100 Persen	2.168.269.890	100 Persen	2.168.269.890	100 Persen	2.168.269.890	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.560.000	2 Laporan	2.560.000	2 Laporan	2.560.000	2 Laporan	2.560.000	2 Laporan	2.560.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peraltan dan Perlengkapan Kantor yan Disediakan												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	12 Laporan	1.794.767.914	12 Laporan	1.665.709.890	12 Laporan	1.665.709.890	12 Laporan	1.665.709.890	12 Laporan	1.665.709.890	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 Persen	100 Persen	349.288.800	100 Persen	396.037.000	100 Persen	396.037.000	100 Persen	396.037.000	100 Persen	396.037.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	31 Unit	32.000.000	31 Unit	32.000.000	31 Unit	32.000.000	31 Unit	32.000.000	31 Unit	32.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	4 Unit	70.000.000	4 Unit	129.029.000	4 Unit	129.029.000	4 Unit	129.029.000	4 Unit	129.029.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya												
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	4 Unit	52.948.000	4 Unit	35.008.000	4 Unit	35.008.000	4 Unit	35.008.000	4 Unit	35.008.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara												
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	194.340.800	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi												

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 Persen	100 Persen	3.164.624.214	100 Persen	3.159.922.818	100 Persen	3.159.922.818	100 Persen	3.159.922.818	100 Persen	3.159.922.818	S.3.1
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/ kota	0	100 Persen	3.164.624.214	100 Persen	3.159.922.818	100 Persen	3.159.922.818	100 Persen	3.159.922.818	100 Persen	3.159.922.818	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	0	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	0	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	0 Laporan	2 Laporan	150.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	100 Komunitas	112 Komunitas	27.378.000	124 Komunitas	27.378.000	136 Komunitas	27.378.000	148 Komunitas	27.378.000	160 Komunitas	27.378.000	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	15 Permohonan	20 Permohonan	178.435.664	25 Permohonan	186.794.000	30 Permohonan	186.794.000	35 Permohonan	186.794.000	40 Permohonan	186.794.000	
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	54.430.976	2 Rekomendasi	56.960.000	2 Rekomendasi	56.960.000	2 Rekomendasi	56.960.000	2 Rekomendasi	56.960.000	
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	0	100 Persentase	1.054.292.738	100 Persentase	1.209.712.738	100 Persentase	1.209.712.738	100 Persentase	1.209.712.738	100 Persentase	1.209.712.738	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	6 Media	612.272.108	6 Media	640.720.080	6 Media	640.720.080	6 Media	640.720.080	6 Media	640.720.080	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	113.716.400	1 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	19.000.000	
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	129 Konten	144 Konten	920.051.680	159 Konten	962.800.000	174 Konten	962.800.000	189 Konten	962.800.000	204 Konten	962.800.000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	152 Orang	200 Orang	54.046.648	250 Orang	56.558.000	300 Orang	56.558.000	350 Orang	56.558.000	400 Orang	56.558.000	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase Perangkat Daerah yang mendapat layanan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	100 Persen	100 Persen	11.258.894.663	100 Persen	11.568.254.292	100 Persen	13.568.254.292	100 Persen	13.568.254.292	100 Persen	13.568.254.292	S.3.1
	2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Permendagri 18 Tahun 2020)	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan seeara online dan terintegrasi (Permendagri 18 Tahun 2020)	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai	100 Persen	100 Persen	185.438.958	97,41 Persen	194.055.000	98,13 Persen	194.055.000	98,75 Persen	194.055.000	99,06 Persen	194.055.000	
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	100 Persen	100 Persen	185.438.958	1 Dokumen	194.055.000	1 Dokumen	194.055.000	1 Dokumen	194.055.000	1 Dokumen	194.055.000	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi penunjang e-government terbangun dan terpelihara	6 Aplikasi	6 Aplikasi	11.073.455.705	7 Aplikasi	11.374.199.292	8 Aplikasi	13.374.199.292	9 Aplikasi	13.374.199.292	9 Aplikasi	13.374.199.292	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah aplikasi/aplikasi berbasis web yang aktif digunakan oleh perangkat daerah	120 Aplikasi	112 Aplikasi		116 Aplikasi		120 Aplikasi		123 Aplikasi		123 Aplikasi		
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	4 Aplikasi	4 Aplikasi	367.211.200	4 Aplikasi	384.324.000	4 Aplikasi	384.324.000	4 Aplikasi	384.324.000	4 Aplikasi	384.324.000	
Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo												
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda												
Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah													
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	0 Dokumen	1 Dokumen	95.140.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	65 Perangkat Daerah	5.830.635.200	65 Perangkat Daerah	6.195.664.292	65 Perangkat Daerah	6.195.664.292	65 Perangkat Daerah	6.195.664.292	65 Perangkat Daerah	6.195.664.292	
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	0 Layanan	2 Layanan	589.225.000	2 Layanan	589.225.000	2 Layanan	589.225.000	2 Layanan	589.225.000	2 Layanan	589.225.000	
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	0 Aplikasi	6 Aplikasi	342.491.000	6 Aplikasi	368.491.000	6 Aplikasi	368.491.000	6 Aplikasi	368.491.000	6 Aplikasi	368.491.000	
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	0 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	85.075.000	1 Laporan	85.075.000	1 Laporan	85.075.000	1 Laporan	85.075.000	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0 Aplikasi	1 Aplikasi	30.500.000	1 Aplikasi	50.000.000	1 Aplikasi	50.000.000	1 Aplikasi	50.000.000	1 Aplikasi	50.000.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	0 Laporan	4 Laporan	252.295.000	4 Laporan	180.000.000	4 Laporan	180.000.000	4 Laporan	180.000.000	4 Laporan	180.000.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	0 Perangkat Daerah	65 Perangkat Daerah	3.201.523.305	65 Perangkat Daerah	3.040.000.000	65 Perangkat Daerah	5.040.000.000	65 Perangkat Daerah	5.040.000.000	65 Perangkat Daerah	5.040.000.000	
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	268.875.000	1 Dokumen	281.420.000	1 Dokumen	281.420.000	1 Dokumen	281.420.000	1 Dokumen	281.420.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	0 Dokumen	1 Dokumen	95.560.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.225.766.459		1.282.787.000		1.282.787.000		1.282.787.000		1.282.787.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.225.766.459	100 Persen	1.282.787.000	100 Persen	1.282.787.000	100 Persen	1.282.787.000	100 Persen	1.282.787.000	S.3.1
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaedah satu data	64 Persen	70 Persen	1.225.766.459	75 persen	1.282.787.000	80 persen	1.282.787.000	85 persen	1.282.787.000	90 persen	1.282.787.000	
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100%	100%	33.325.600	100%	45,780,600	100%	45,780,600	100%	45,780,600	100%	45,780,600	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%	100%	541.538.459	100%	547.139.300	0%	547.139.300	0%	547.139.300	0%	547.139.300	
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	100%	252.341.100	100%	272.325.800	100%	272.325.800	100%	272.325.800	100%	272.325.800	
Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	0 Orang	65 Orang	371.674.500	65 Orang	387.104.500	65 Orang	387.104.500	65 Orang	387.104.500	65 Orang	387.104.500	
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan												

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	100%	15.268.400	100%	16.568.400	100%	16.568.400	100%	16.568.400	100%	16.568.400	
Penyelenggaaan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata												
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	1 Laporan	11.618.400	1 Laporan	13.868.400	1 Laporan	13.868.400	1 Laporan	13.868.400	1 Laporan	13.868.400	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.874.450.500		1.438.366.000		1.438.366.000		1.438.366.000		1.438.366.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penurunan Serangan Cyber	69.92%	70.54%	1.874.450.500	71.32%	1.438.366.000	72.09%	1.438.366.000	72.87	1.438.366.000	73.64	1.438.366.000	S.3.1

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Elektronik dengan prinsip sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkup pemerintah daerah ada pada pemerintah daerah	0	65 Perangkat Daerah	1.874.450.500	65 Perangkat Daerah	1.438.366.000	65 Perangkat Daerah	1.438.366.000	65 Perangkat Daerah	1.438.366.000	65 Perangkat Daerah	1.438.366.000	
	2. Jumlah Pengujian keamanan sistem elektronik (Pentest)	0	5 Aplikasi		5 Aplikasi		5 Aplikasi		5 Aplikasi		5 Aplikasi		
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	1.353.682.500	1 Laporan	892.176.000	1 Laporan	892.176.000	1 Laporan	892.176.000	1 Laporan	892.176.000	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	65 PD	65 PD	236.713.000	65 PD	262.135.000	65 PD	262.135.000	65 PD	262.135.000	65 PD	262.135.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	284.055.000	1 Dokumen	284.055.000	1 Dokumen	284.055.000	1 Dokumen	284.055.000	1 Dokumen	284.055.000	
JUMLAH				33.873.682.350		33.825.348.000		33.825.348.000		33.825.348.000		33.825.348.000	

Sumber : Sub Bagian Program Diskominfo Tahun 2025

Ket :

S 3.1 = Program Prioritas Sasaran dalam menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 3 sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Diskominfo merumuskan sub kegiatan yang akan membentu mewujudkan Program Prioritas Bupati yang dikenal dengan nama Asta Cita. Asta cita adalah Program yang dibuat untuk mewujudkan visi misi Bupati secara terukur. Untuk melihat sub kegiatan Diskominfo dan program asta cita yang didukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas	Outcome	Sub kegiatan	Ket
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	PN 1
		Pelayanan Informasi Publik	PN 1
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	PN 1
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	PN 1
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	PN 7
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	PN 7
		Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	R 31
		Penyediaan Akses Internet	PN 7
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	PN 7

Program prioritas	Outcome	Sub kegiatan	Ket
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	PN 7
		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	PN 7
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	PN 2
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	PN 7

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Ket:

PN 1 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi Manusia (HAM)

PN 2 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

PN 7 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

R 31 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Sinergitas Pemerintahan antara Pusat dan Daerah

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra pd tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama. IKU mencerminkan hasil utama yang ingin dicapai dan menjadi tolak ukur kinerja Perangkat Daerah. IKU penting untuk mengukur capaian kinerja, mendorong akuntabilitas, dan menjadi acuan evaluasi dan *monitoring*. Indikator Kinerja Utama Diskominfo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Diskominfo

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	Indeks Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	poin	0	75	77	78	79	80	81	Nilai yang menggambarkan tingkat transformasi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, dihitung berdasarkan skor capaian indikator-indikator komponen transformasi layanan publik sesuai metodologi yang ditetapkan pemerintah.
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,98	3,2	1,83	1,92	1,96	2	2,04	Nilai yang menunjukkan tingkat penerapan SPBE di instansi pemerintah, dihitung dari penilaian atas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE sesuai pedoman evaluasi SPBE.
3.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,84	2,84	3,02	3,04	3,2	3,23	3,4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
4.	Indeks Keamanan Informasi	poin	451	454	455	460	465	470	475	Nilai yang menunjukkan tingkat keamanan informasi di instansi pemerintah, dihitung dari hasil penilaian komponen tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko, dan pengendalian teknis sesuai standar yang berlaku.

Sumber : Sub Bagian Program Diskominfo Tahun 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK membantu mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, serta umpan balik untuk perbaikan di masa depan. IKK Diskominfo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Diskominfo

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	Indeks Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	poin	0	75	77	78	79	80	81	Nilai yang menggambarkan tingkat transformasi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, dihitung berdasarkan skor capaian indikator-indikator komponen transformasi layanan publik sesuai metodologi yang ditetapkan pemerintah.
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,98	3,2	1,83	1,92	1,96	2	2,04	Nilai yang menunjukkan tingkat penerapan SPBE di instansi pemerintah, dihitung dari penilaian atas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE sesuai pedoman evaluasi SPBE.
3.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,84	2,84	3,02	3,04	3,2	3,23	3,4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
4.	Indeks Keamanan Informasi	poin	451	454	455	460	465	470	475	Nilai yang menunjukkan tingkat keamanan informasi di instansi pemerintah, dihitung dari hasil penilaian komponen tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko, dan pengendalian teknis sesuai standar yang berlaku.

Sumber : Sub Bagian Program Diskominfo Tahun 2025

4.5 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan 2025-2029

Dalam mendukung tematik pembangunan Kabupatenn Baandung Tahun 2025-2029, Diskominfo mendukung sub tema satu "Peningkatan Ketahanan Pangan", khususnya menjawab permasalahan belum optimalnya pemanfaatan potensi pangan di Kabupaten Bandung. yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan data dan informasi yang komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah memperkuat potensi ketahanan pangan daerah melalui ketersediaan data dan informasi yang berkualitas. Untuk itu, ditetapkan Critical Success Factor (CSF) berupa tersedianya basis data potensi pangan daerah yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, sehingga dapat menjadi landasan perencanaan, monitoring, dan evaluasi ketahanan pangan.

Kondisi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tersebut adalah terselenggaranya pendataan dan pemetaan potensi pangan secara berkala dengan dukungan sinergi antar perangkat daerah, sehingga informasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Sebagai bentuk implementasi, Diskominfo melaksanakan indikasi aktivitas berupa peningkatan kualitas statistik sektoral, yang diwujudkan melalui penguatan tata kelola data, standardisasi metadata,

integrasi data lintas sektor, serta pemanfaatan platform statistik daerah yang mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat dan akuntabel.

Diskominfo Kabupaten Bandung juga berperan penting dalam mendukung sub tema pembangunan dua "Pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu", khususnya dalam menjawab permasalahan belum optimalnya pengembangan pariwisata serta keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, dan pemasaran bagi sentra industri kecil dan usaha mikro terpadu.

Melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Diskominfo berkontribusi pada:

1. Meningkatkan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah dengan menyediakan infrastruktur digital, sistem informasi pariwisata, serta mendukung branding dan promosi destinasi wisata berbasis teknologi.
2. Mewujudkan ekosistem usaha kecil mikro yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dengan menghadirkan database UKM, membuka akses *digital marketing*, serta membangun platform promosi dan perdagangan online bagi pelaku usaha.
3. Mendorong sinergi lintas sektor melalui integrasi data dan sistem informasi, yang menjadi dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pengembangan pariwisata serta penguatan UMKM.

Dalam kerangka tersebut, terdapat *Critical Success Factors* (CSF) yang didukung Diskominfo, yaitu:

- Terciptanya Branding dan Promosi melalui kanal informasi resmi pemerintah, media sosial, website pariwisata, serta kampanye digital yang efektif.
- Terciptanya Infrastruktur dan Konektivitas yang mendukung kawasan pengembangan pariwisata melalui pemerataan jaringan internet, akses komunikasi data, dan *smart tourism services*.
- Tersedianya regulasi, *database*, dan sistem informasi yang terintegrasi sebagai fondasi kebijakan dan layanan berbasis data dalam mendukung pariwisata dan UMKM.

Adapun program daerah yang sejalan dengan tema pembangunan kawasan ekonomi terpadu yang relevan dengan Diskominfo antara lain:

- Peningkatan Pemasaran Pariwisata dan Investasi Wisata berbasis digital.
- Peningkatan Akses dan Konektivitas Kawasan Pengembangan Pariwisata melalui perluasan jaringan internet dan komunikasi data.
- Peningkatan Tata Kelola Ekosistem UKM di Kabupaten Bandung melalui digitalisasi UMKM, pengembangan *marketplace* lokal, dan integrasi data pelaku usaha.

Lebih lanjut, implementasi program diwujudkan dalam bentuk indikasi aktivitas Diskominfo, antara lain:

- Penyebaran regulasi, data, dan informasi pariwisata melalui berbagai kanal komunikasi.
- Peningkatan promosi pariwisata lewat media cetak, elektronik, dan media digital lainnya.
- Penyediaan sarana akses informasi dan komunikasi di kawasan wisata prioritas.
- Pengembangan sistem informasi dan integrasi database pengembangan UMKM.
- Penyusunan dan updating database UKM sebagai basis pengambilan kebijakan dan promosi usaha.

Secara umum, Diskominfo mendukung semua sub tema pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yaitu sub tema tiga "Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung", sub tema empat "SDM Bedas", dan sub tema lima "Lingkungan Hidup Berkualitas. Hal ini karena basis data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam mendukung tematik pembangunan.

Sub tema tersebut berangkat dari permasalahan belum optimalnya implementasi Perda dan Perbup terkait tata ruang dan belum optimalnya pengendalian perijiinan, permasalahan masih rendahnya cakupan dan kualitas layanan gizi serta kesehatan dasar pada kelompok sasaran prioritas dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting, dan permasalahan belum optimalnya penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk mengambil keputusan yang tepat diperlukan data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.

Basis data yang baik dapat menunjukkan keadaan di lapangan secara rill dan aktual. Hal ini Diskominfo dukung dengan dilaksanakannya program penyelenggaraan statistik sektoral. Melalui aktivitas peningkatan

kualitas statistik sektoral, diharapkan tersedianya basis data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi. Dengan begitu pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat.

Dengan kontribusi tersebut, Diskominfo Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam mendukung seluruh sub tema pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 melalui penyediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Sebagai penyedia, pengelola, dan integrator data sektoral, Diskominfo menjadi fondasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat, efektif, dan akuntabel.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen Renstra Diskominfo disusun sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah di bidang komunikasi dan informatika, serta mendukung implementasi transformasi digital pemerintah daerah. Berikut adalah kesimpulan umum dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung :

1. Arah Kebijakan dan Strategi yang Terukur
   Renstra Diskominfo memuat arah kebijakan strategis dalam bidang komunikasi publik, layanan informasi, pengelolaan data, infrastruktur TIK, dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Semua strategi diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta RPJMD
   Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra sejalan dengan visi-misi kepala daerah dan RPJMD. Diskominfo menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi, keterbukaan informasi, ketersediaan data statistik sectoral yang berkualitas dan keamanan informasi.
3. Fokus pada Transformasi Digital Daerah
   Renstra mengarahkan semua kegiatan untuk mendukung:
   - Integrasi sistem informasi pemerintah daerah (Pemerintahan Digital),
   - Penguatan infrastruktur TIK,
   - Pengelolaan data daerah (Satu Data),
   - Peningkatan literasi digital ASN dan masyarakat.
4. Penguatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
   Diskominfo memperkuat diseminasi informasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan membangun citra positif pemerintah daerah melalui kanal media digital dan konvensional.
5. Dukungan terhadap Inovasi Layanan Publik
   Diskominfo berperan sebagai fasilitator OPD lain dalam pengembangan aplikasi layanan digital dan sistem manajemen data lintas sektor.
6. Indikator Kinerja dan Program Prioritas yang Jelas
   Renstra memuat indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja

kegiatan (IKK) yang spesifik dan terukur untuk memudahkan pemantauan capaian tahunan dan akhir periode.

7. Responsif terhadap Perkembangan Teknologi dan Regulasi Dokumen dirancang fleksibel agar dapat menyesuaikan dinamika regulasi pusat (misalnya SPBE menuju Pemerintahan Digital, Inmendagri No. 2 Tahun 2025, dan kebijakan Kementerian Komdigi) serta tren teknologi digital (big data, AI, cloud, keamanan siber, dll).
8. Komitmen terhadap Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan Renstra menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala sebagai dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan kegiatan Diskominfo selama periode lima tahunan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2025–2029 berpedoman pada prinsip, arah kebijakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah. Adapun kaidah pelaksanaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Keselarasan Perencanaan Renstra Diskominfo disusun selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Bupati sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, memperhatikan tema pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mendukung kebijakan nasional sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Pendekatan Perencanaan Perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial (HTIS), berbasis data dan bukti (evidence-based policy), partisipatif, serta berorientasi hasil (outcome-oriented) yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
- Pengelolaan Anggaran Penganggaran dilaksanakan dengan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), di mana setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja, target terukur, dan alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Sinkronisasi dan Sinergi Pelaksanaan Renstra mengedepankan sinergi antar-Perangkat Daerah untuk menghindari tumpang tindih program

dan kegiatan, serta sinkronisasi dengan kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pihak non-pemerintah, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

- Tata Kelola Pelaksanaan Penyelenggaraan program dan kegiatan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, didukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pengembangan inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

5.3 Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung yang kemudian disebut Diskominfo merupakan Perangkat Daerah yang dalam pelaksanan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis. Seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberdaan Diskominfo Kabupaten Bandung merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan telah tersusunnya dokumen Renstra ini, maka Diskominfo Kabupaten Bandung harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM di bidang Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian karena Diskominfo Kabupaten Bandung merupakan pintu gerbang informasi Pemerintah Kabupaten Bandung dengan senantiasa menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat baik skala lokal, regional dan nasional juga sebagai Perangkat Daerah yang menjalin komunikasi timbal balik yang seimbang, aspiratif, dan efektif sesuai dengan paradigma yang berkembang saat ini.

Selain itu Renstra Diskominfo menjadi dokumen fundamental yang tidak hanya menjabarkan rencana kerja lima tahunan, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat terhadap transformasi digital, pelayanan publik yang transparan, dan kolaborasi lintas sektor. Implementasi dokumen ini akan menentukan keberhasilan daerah dalam menjawab tantangan era digital pemerintahan.

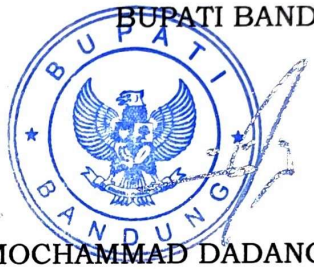
Soreang, 17 September 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

ttd

TEGUH PURWADI

BUPATI BANDUNG



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan pendidikan 20
Tabel 2.2 Komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan Golongan Ruang 21
Tabel 2.3 Asset Diskominfo..... 23
Tabel 2.4 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 25
Tabel 2.5 Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024 29
Tabel 2.6 Capaian Serapan Anggaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024 38
Tabel 2.7 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah 55
Tabel 2.8 Isu Strategis Diskominfo 61
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo 66
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Diskominfo..... 70
Tabel 3.3 Penyajian Lokus Diskominfo..... 72
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Diskominfo 74
Tabel 4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung 81
Tabel 4.2 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung..... 128
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 157
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Diskominfo..... 159
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Diskominfo 160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Diskominfo 19
Gambar 2.2 Komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan pendidikan 20
Gambar 3.1 Konsep Renstra Diskominfo 63
Gambar 3.2 Keterkaitan Renstra Diskominfo 64
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD (berdasarkan inmendagri 2 tahun 2025 128
Gambar 4.2 Keselarasan Renstra dan RPJMD 2025-2029..... 128